



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SAMBAS

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2026



A L A M A T :

JALAN PEMBANGUNAN SAMBAS KODE POS. 79400
TELP. 0562-391004 FAX. 0562391003

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengisyaratkan bahwa setiap OPD wajib menyusun dokumen Rencana Strategis SKPD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan serta aplikasi kegiatan dan indikator kerja untuk mencapai sasaran pembangunan terkait: 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 2) Urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

Mungkin dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas ini terdapat kekurangan, maka kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang membangun untuk penyempurnaan dikemudian hari.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sambas



SITI MUJIATI, SKM., M.Si.
NIP. 19830723 200502 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	9
1.3. Maksud dan Tujuan	14
1.4. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	18
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah	18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	53
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	76
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	82
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	108
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	112
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	112
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	114
3.3. Program dan Kegiatan	135
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	154
BAB V PENUTUP	170

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (T-C.29.) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja	20
Tabel 2.2 Program/Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target Kinerja.....	41
Tabel 2.3 Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mencapai Target.....	44
Tabel 3. (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)	75
Tabel 5. (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)	84
Tabel 6. (Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)	109
Tabel 7. (Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)	110
Tabel 8. Matrik Tujuan/Sasaran Tahun 2021-2026.....	116
Tabel 9. Renja Dinas Sesuai Pagu Platfond Sementara Tahun 2026	135
Tabel 10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Skpd)	154

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. RKPD dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas merupakan perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan. Misi ke-2 pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing sebagai sasaran renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas. Selain itu RKPD tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi hingga tingkat pusat, untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang

berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2026 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan administrasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

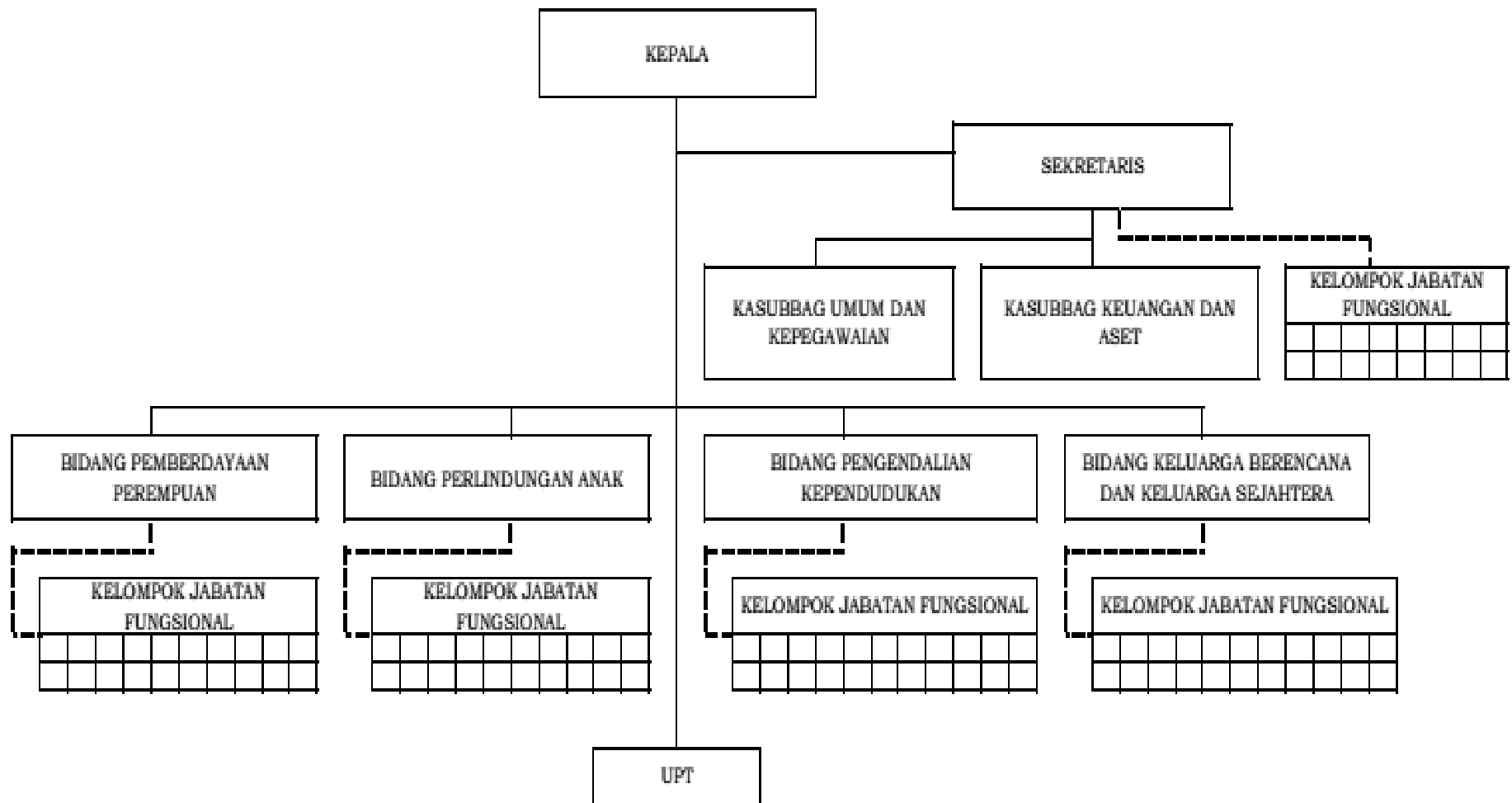
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas terdiri dari:

1. Kepala
2. Bagian Sekretariat membawahi :
 - a. Fungsional Perencana
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi :
 - a. Kelompok jabatan fungsional
4. Bidang Perlindungan Anak membawahi :
 - a. Kelompok jabatan fungsional
5. Bidang Pengendalian Kependudukan membawahi :
 - a. Kelompok jabatan fungsional
6. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi :
 - a. Kelompok jabatan fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Gambar 1

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas adalah sbb:



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalog Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4419);

- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 10) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Person Especially Woman and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135);

- 14) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 21) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 22) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 30) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 31) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 32) Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.26A/M.PPN/HK/05/2025 Tentang Kode Referensi Indikator Pembangunan;
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4);
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 83);
- 39) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025-

2029 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 48);

- 40) Peraturan Bupati Sambas Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 94).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

2. Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2026.
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026.
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pokok–pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs (*Sustainable Development Goals*), Pencapaian NSPK, SPM, Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan, Pencapaian Kualitas Hidup Anak, dan Pencapaian Kualitas Keluarga dan Penduduk;

- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan ;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Revisi). Adapun penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun berjalan sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025; dan
- e. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Kinerja disajikan dalam 2 (dua) istilah, yaitu realisasi dan capaian. Realisasi kinerja dimaknai sebagai data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dilapangan tanpa ada proses perbandingan terhadap target. Sedangkan, capaian kinerja dimaknai sebagai data hasil perbandingan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja dihitung dengan memperhatikan jenis indikator: 1) indikator positif adalah apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka dihitung dengan rumus $\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$; 2) indikator negatif adalah apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka dihitung dengan rumus $\frac{(\text{target} - \text{realisasi})}{\text{target}} \times 100\%$. Capaian dengan nilai sama dengan atau melebihi 100% (seratus persen) berarti telah mencapai atau melewati target dan sebaliknya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan realisasi kinerja tahun berjalan telah disesuaikan dengan Kepmendagri Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga tetap dapat dievaluasi dan sesuai dengan perubahan regulasi yang mengikat.

Pemetaan program dan kegiatan tahun 2026 sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hingga program dan kegiatan yang dipilih dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemilihan indikator dan target kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku, hasil penyusunan pohon kinerja dan ketersediaan data sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah. *Core business* Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai organisasi perencana disajikan dalam tabel 2.1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017).

Tabel 2.1 (T-C.29.)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Semester I Tahun 2025 (tahun berjalan)*

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Tujuan	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	AA kategori	100%	100%	100%	100%	AA kategori	AA kategori	AA kategori
Sasaran	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	AA kategori	100%	100%	100%	100%	AA kategori	AA kategori	AA kategori
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya capaian pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 dokumen	5 Dokumen	83,33 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 dokumen	5 Dokumen	83,33 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 dokumen	5 Dokumen	83,33 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 dokumen	5 Dokumen	83,33 %
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 dokumen	5 Dokumen	83,33 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	5 Laporan	83,33 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	5 Laporan	83,33 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	198 Orang/ bulan	90 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan	100 %	33 Orang/bulan	155 Orang/ bulan	78,28 %
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	83,33 %
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	83,33 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	5 Laporan	83,33 %
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	83,33 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	5 Laporan	83,33 %
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	83,33 %
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	1 Laporan	5 Laporan	83,33 %
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	5 Laporan	83,33 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	12 Orang	5 Orang	2 Orang	2 Orang	100 %	1 Orang	8 Orang	66,67%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	5 Paket	83,33 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	5 Paket	83,33 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	5 Paket	83,33 %
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	5 Paket	83,33 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	6 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	5 Dokumen	83,33 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272 Laporan	43 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	100 %	48 Laporan	136 Laporan	50 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	5 Laporan	83,33 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	5 Laporan	83,33 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	5 Laporan	83,33 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100 %	6 Unit	18 Unit	51,42 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	30 Unit	12 Unit	12 Unit	100 %	30 Unit	72 Unit	42,35 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	9 Unit	50 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Penataan Organisasi	Meningkatkan Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	1 dokumen	5 Dokumen	83,33 %
Tujuan 1:	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,26%	65,92%	65,26%	65,92%	101%	71,26%	67,26%	102 %
Sasaran 1 :	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta kesetaraan gender	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5 per 100.000 penduduk perempuan	8,8 per 100.000 penduduk perempuan	9 per 100.000 penduduk perempuan	8,5 per 100.000 penduduk perempuan	94%	6 per 100.000 penduduk perempuan	8 per 100.000 penduduk perempuan	90,1 %
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik	Persentase ARG pada Belanja Operasional APBD	100 %	100 %	80 %	43,92%	53,92%	90%	80 %	80 %
Pelebagaan Pangarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelebagaan Pangarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang membuat SK Fokal point PUG	24 Organisasi Perangkat Daerah	6 Organisasi Perangkat Daerah	14 Organisasi Perangkat Daerah	8 Organisasi Perangkat Daerah	57,14%	10 organisasi perangkat daerah	24 Organisasi Perangkat Daerah	100 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100 %	10 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	83,33 %
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan yang Dibina	5 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %	2 Lembaga	4 Lembaga	80 %
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	240 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	100 %	80 Orang	240 Orang	100 %
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dalam rangka mendukung kegiatan kampanye gerakan tiga akhri	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	80 %
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	4 Orang	6 Orang	5 Orang	7 Orang	140%	5 Orang	18 Orang	450 %
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Dibina	12 Lembaga	8 Lembaga	10 Lembaga	4 Lembaga	40%	11 Lembaga	12 Lembaga	100 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	100 %	4 Dokumen	9 Dokumen	90 %
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga melalui perwujudan kesetaraan gender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	65.5 %	100 %	64.5 %	34,38%	53,30%	65%	53,30%	81,37 %
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mendorong Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	15 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33%	4 Kegiatan	10 Kegiatan	66,67 %
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	4 Dokumen	83,33 %
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	2 Laporan	2 Dokumen	1 Laporan	50%	1 Laporan	4 Laporan	83,33 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak	100 %	100 %	100 %	0 %	0%	100%	100 %	100 %
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Yang Menyediakan dan Memfaatkan Data Gender dan Anak	20 Organisasi Perangkat Daerah	2 Organisasi Perangkat Daerah	15 Organisasi Perangkat Daerah	1 Organisasi Perangkat Daerah	6,67%	10 organisasi perangkat daerah	13 Organisasi Perangkat Daerah	65 %
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40 %
Tujuan 2 :	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran 2 :	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	570 poin	300 poin	336,05 poin	400 poin	112%	530 poin	650 poin	114 %
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya skor indikator pemenuhan Hak Anak	Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	290 poin	183 poin	250 poin	225 poin	90%	270 poin	678 poin	233,79 %
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satuan Gugus Tugas yang dikembangkan	25 Gugus Tugas	5 Gugus Tugas	5 Gugus Tugas	3 Gugus Tugas	60%	5 Gugus Tugas	13 Gugus Tugas	53 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	25 Organisasi	9 Organisasi	6 Organisasi	6 Organisasi	100 %	5 Organisasi	20 Organisasi	80 %
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia Layanan yang ramah anak	104 LRA	20 LRA	20 LRA	20 LRA	100 %	22 LRA	62 LRA	59,61 %
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	220 Orang	50 Orang	80 Orang	80 Orang	100 %	50 Orang	180 Orang	81,81 %
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Dokumen	22 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	26 Dokumen	86,67 %
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya skor indikator Perlindungan khusus anak	Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	110 poin	75 poin	90 poin	37 poin	100 %	100 poin	202 poin	183,63 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	208 Kasus	44 Kasus	40 Kasus	9 Kasus	100 %	40 Kasus	83 Kasus	39,9 %
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %	1 Perangkat Daerah	3 Kegiatan	60 %
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	500 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 %	100 Orang	300 Orang	60 %
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	250 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100 %	50 Orang	150 Orang	60 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 Dokumen	5 Dokumen	100 %
Tujuan 3 :	Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga	Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)	61,90%	80,86%	57,90%	63,4	110%	60,9%	58,90%	11,78
Sasaran 3.1 :	Meningkatnya pengendalian penduduk	Rata-rata jumlah anak (penduduk usia 0-18 tahun) yang ada dalam satu keluarga.	1,2 orang	1,62 orang	1,37 orang	1,36 orang	101%	1,24 orang	1,36 orang	98 %
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya pengendalian penambahan penduduk dalam keluarga	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3.50 orang	3,5 orang	3,6 orang	3,2 orang	100 %	3,55 orang	3,2 orang	91,2 %
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatkan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal	19 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	4 Dokumen	14 Dokumen	73,68 %
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	16,67 %
Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Terlaksananya Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	34 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	0 Dokumen	0%	6 Dokumen	12 Dokumen	35,29 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Data Kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan Kampung KB	12 unit	5 unit	5 unit	2 unit	100 %	2 unit	9 unit	75 %
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	28 Laporan	14 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	5 Laporan	24 Laporan	85,71 %
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	50 %
Sasaran 3.2 :	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,80%	11%	17%	14%	117%	13,80%	14%	82 %
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya cakupan peserta KB	Rasio Akseptor KB	90.28 %	100 %	89,41 %	87 %	100 %	90,28%	90,28%	100 %
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatkan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang mendukung Program Bangga Kencana	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	100 %	19 Kecamatan	19 Kecamatan	100 %
Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	20 Laporan	8 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100 %	5 Laporan	17 Laporan	85 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100 %	19 Unit	19 Unit	100 %
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	114 Dokumen	57 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100 %	19 Dokumen	95 Dokumen	83,33 %
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100 %	19 Dokumen	19 Dokumen	100 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	114 Laporan	57 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100 %	19 Dokumen	95 Dokumen	100 %
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, ependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	0 Laporan	10 Organisasi	10 Organisasi	100 %	10 Organisasi	10 Organisasi	100 %
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Penyuluh KB yang berkinerja baik	27 orang	23 orang	25 orang	11 orang	44	26 orang	24 orang	88,89 %
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	195 orang	193 Orang	195 Orang	195 Orang	100 %	195 orang	195 orang	100 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100 %	19 Laporan	19 Laporan	100 %
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100 %	111 %	100 %	71,47%	71,47%	100 %	100 %	71,47%
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	270 Laporan/ KKB	162 Laporan/ KKB	54 Laporan/ KKB	54 Laporan/ KKB	100 %	54 Laporan/ KKB	216 Laporan/ KKB	80 %
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1051 Orang	1044 Orang	210 Orang	210 Orang	100 %	220 Orang	1494 Orang	141,76 %
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit	16 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	0 Unit	19 Unit	100 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	114 Laporan	57 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100 %	19 Laporan	95 Laporan	83,33 %
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanandan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peserta KB baru	21.77 %	16 %	18,79 %	16,46%	87,59%	20,28%	55%	253 %
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	204 Laporan	102 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	100 %	34 Laporan	136 Laporan	66,67 %
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	195 Kampung KB	68 Kampung KB	34 Kampung KB	34 Kampung KB	100 %	34 Kampung KB	126 Kampung KB	64,61 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	96.15 %	19,2 %	57,6 %	57,6 %	100 %	76,90%	87,2 %	90,69 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R) yang di bina	96.15 %	19,2 %	57,6 %	57,6 %	100 %	76,9%	87,2 %	90,69 %
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	576 Laporan	576 Laporan	576 Laporan	576 Laporan	100 %	576 Laporan	576 Laporan	100 %
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	100 Unit	24 Unit	31 Unit	31 Unit	100 %	20 Unit	75 Unit	75 %
Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2.280 orang	1.520 Orang	380 Orang	380 Orang	100 %	380 Orang	1.900 Orang	83,33 %
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	100 %	19 Laporan	19 Laporan	100 %

Tujuan/Sasaran/ Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (outcome)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (outcomes)/ Kegiatan/ sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-4) (2020- 2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan Tahun 2025 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d semester I tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/5)
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah TPK melakukan pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.248/416 Orang/Tim	1.248/416 Orang/Tim	1.248/416 Orang/Tim	1.248/416 Orang/Tim	100 %	1.248/416 Orang/Tim	1.248/416 Orang/Tim	100 %
Rata-rata						97,07 Dokumen				
Kriteria						Sangat Tinggi				

Batasan ukuran yang digunakan untuk penetapan program/kegiatan yang mencapai target dan tidak mencapai target pada tahun kelima renstra 2021-2026 sebesar 100%. Program/kegiatan yang telah mencapai 100% terhadap renstra dikategorikan telah mencapai target, sementara yang capaiannya lebih kecil dari 100% dikategorikan belum mencapai target.

a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) terdapat 10 program dan 26 kegiatan. Sebanyak 4 (40%) program belum mencapai target sampai dengan renstra 2025 dengan nilai interval 80%-91,2%. Sebanyak 12 (46,15%) kegiatan belum mencapai target sampai dengan renstra 2025 pada interval nilai 39,9%-90,69%. Kegiatan dengan capaian kinerja masih jauh dari target yaitu Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (indikator output: Jumlah penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak 39,9%). Kondisi ini tampak seiring dengan kegiatan lain yang berorientasi proses yaitu kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (indikator output: Jumlah Satuan Gugus Tugas yang dikembangkan 53%) dan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (indikator output: Jumlah Penyedia Layanan yang ramah anak 59,61%). Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Program/Kegiatan Yang Tidak Mencapai Target Kinerja

NO	URAIAN	OUTCOME	OUTPUT	CAPAIAN RENSTRA s/d 2025
I	PROGRAM			
1	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik	Persentase ARG pada Belanja Operasional APBD	80 %

NO	URAIAN	OUTCOME	OUTPUT	CAPAIAN RENSTRA s/d 2025
2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga melalui perwujudan kesetaraan gender dalam pembangunan	Partisipasi angkatan kerja perempuan	81,37 %
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya pengendalian pertambahan penduduk dalam keluarga	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	91,2 %
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	90,69 %
II	KEGIATAN			
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan yang Dibina	80 %
2	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pelaksanaan koordinasi dalam rangka mendukung kegiatan kampanye gerakan tiga akhiri	80 %
3	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mendorong Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	66,67 %
4	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Yang Menyediakan dan Memanfaatkan Data Gender dan Anak	65 %
5	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Satuan Gugus Tugas yang dikembangkan	53 %
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyedia Layanan yang ramah anak	59,61 %

NO	URAIAN	OUTCOME	OUTPUT	CAPAIAN RENSTRA s/d 2025
7	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	39,9 %
8	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatkan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal	73,68 %
9	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Data Kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan Kampung KB	75 %
10	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Penyuluh KB yang berkinerja baik	88,89 %
11	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	71,47%
12	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL. UPPKS, PIK R) yang di bina	90,69 %

b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan;

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Tabel 1 (Tabel T-C.29,

Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) terdapat 10 program dan 26 kegiatan. Perhitungan program dan kegiatan yang mencapai target memasukan juga capaian yang telah melebihi 100%. Sebanyak 6 (60%) program mencapai target sampai dengan renstra 2025. Sebanyak 14 (53,85%) kegiatan mencapai target sampai dengan renstra 2025. Kondisi ini memberikan gambaran akan kebutuhan peningkatan kinerja yang berorientasi proses untuk mendukung IKU. Program dan kegiatan yang telah mencapai target (100%) dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mencapai Target

NO	URAIAN	OUTCOME	OUTPUT	CAPAIAN RENSTRA s/d 2025
I	PROGRAM			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya capaian pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas	100 %
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak	100 %
4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya cakupan peserta KB	Rasio Akseptor KB	100 %
II	KEGIATAN			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %

NO	URAIAN	OUTCOME	OUTPUT	CAPAIAN RENSTRA s/d 2025
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
8	Penataan Organisasi	Meningkatkan Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100 %
9	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang membuat SK Fokal point PUG	100 %
10	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	100 %
11	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Dibina	100 %

NO	URAIAN	OUTCOME	OUTPUT	CAPAIAN RENSTRA s/d 2025
12	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %
13	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatkan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang mendukung Program Bangga Kencana	100 %

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) terdapat 10 program dan 26 kegiatan. Sebanyak 2 (20%) program melebihi target sampai dengan renstra 2025 pada interval nilai 183,63%-233,79%. Sebanyak 1 (3,85%) kegiatan melebihi target sampai dengan renstra 2025 pada nilai 253%. Kelebihan nilai terhadap target maksimal 100% didapat pada interval nilai 83,63-153. Kondisi ini memberikan gambaran akan kebutuhan keseimbangan prioritas kinerja yang berorientasi proses untuk mendukung IKU. Program dan kegiatan yang melebihi target (100%) dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Melebihi Target

NO	URAIAN	OUTCOME	OUTPUT	CAPAIAN RENSTRA s/d 2025
I	PROGRAM			
1	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya skor indikator pemenuhan Hak Anak	Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak	233,79 %
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya skor indikator Perlindungan khusus anak	Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak	183,63 %

NO	URAIAN	OUTCOME	OUTPUT	CAPAIAN RENSTRA s/d 2025
II	KEGIATAN			
1	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peserta KB baru	253 %

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya/rendahnya realisasi kinerja terhadap target renstra 2021-2026 adalah karena:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal menganalisa konsistensi perencanaan penganggaran sehingga kurang optimal dalam menunjang pencapaian kinerja;
2. Keterbatasan ketersediaan dana yang belum sesuai kebutuhan berdampak pada penurunan realisasi target renja tahunan dibanding dari target renstra;
3. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat secara konsisten atas program dan kegiatan yang telah di sosialisasikan atau dicanangkan berdampak pada tidak berlanjutnya program.
4. Ketidak tepatan waktu, tempat, dan orang pada saat implementasi kegiatan terhadap rencana kegiatan berdampak pada bergesernya sistematisa rencana;
5. Masih ada kegiatan yang harusnya pada tahun 2023 renstra dialokasikan namun tidak dialokasikan sehingga realisasi kinerja program/kegiatannya tidak dapat sepenuhnya dievaluasi;
6. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan kegiatan kovergensi;
7. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan

diselenggarakan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya realisasi kinerja terhadap target renstra 2021-2026 adalah karena:

1. Perencanaan yang realistis dan implementatif.
2. Koordinasi dan kinerja SDM berjalan optimal.
3. Anggaran dan sarana prasarana memadai.
4. Dukungan pimpinan dan stakeholder.

Faktor-faktor yang menyebabkan capaian melebihi target renstra 2021-2026 adalah karena:

1. Efisiensi dan inovasi pelaksanaan kegiatan.
2. Kinerja SDM di atas ekspektasi.
3. Dukungan eksternal yang lebih besar dari rencana.
4. Tingginya partisipasi/permintaan masyarakat.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program dan kegiatan yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya,
2. Terhadap program dan kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan perangkat daerah.
3. Terhadap program dan kegiatan yang realisasinya melebihi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan perangkat daerah.

4. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
5. Pada perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
6. Ketersediaan informasi/data yang memadai mutlak diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Sambas.

Implikasi juga merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah terhadap sasaran RPJMD, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatnya perlindungan terhadap anak
3. Meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga

Adapun implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra sebagai berikut:

- Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan serta kesetaraan gender
- Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
- Meningkatnya pengendalian penduduk
- Meningkatnya kualitas keluarga

Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

- a) Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal
- b) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai

- c) Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang
- d) Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e) Belum terciptanya Desa/ Kecamatan/ Kabupaten Layak Anak

Sedangkan Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

- a) Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) Muda akan manfaat KB secara luas sebagai alat pengatur kelahiran,
- b) Rendahnya Peserta KB Jangka Panjang (MKJP) dan rendahnya kesertaan pria dalam KB.
- c) Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi relative masih rendah.
- d) Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kader KB.
- e) Intensitas pelaksanaan KIE melalui Media Massa masih rendah.
- f) Belum sepenuhnya ada Rumah Data di Kampung KB.
- g) Belum terkoordinasinya Pendidikan berwawasan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di sekolah melalui Sekolah Siaga Kependudukan dalam meningkatkan pengetahuan siswa
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut di atas :

1. Mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal kemampuan menganalisis konsistensi perencanaan penganggaran melalui sosialisasi, pelatihan, bimtek, seminar, kaji banding guna meningkatkan capaian program/kegiatan;
2. Mendorong optimalisasi pengelolaan program/kegiatan melalui kemitraan terutama

- dengan OPD lain dan LSM yang bergerak pada bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Meningkatkan advokasi, monitoring dan evaluasi secara kontinyu serta membuat perjanjian kerja sama terutama di lokasi center program/kegiatan terkait Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 4. Membagi habis tugas dalam struktur tim pelaksana program/kegiatan agar saat pelaksanaan terhadap rencana dapat tepat waktu, tepat tempat dan tepat orang;
 5. Penyusunan renja agar menitik beratkan pada konsistensi terhadap Renstra Perangkat Daerah guna menjamin tercapainya visi misi pemerintah Daerah.
 6. Memperkuat metode penetapan prioritas dengan tetap mempertimbangkan proporsional rasionalisasi anggaran.
 7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi melalui perbaikan sistem pencatatan pelaporan yang terintegrasi antar perangkat daerah terkait.
 8. Meningkatkan pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi Peraturan Menteri PP-PA No. 10 tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilu Tahun 2019, yang mengatur secara rinci yang disusun sebagai dasar pijakan dan memberikan panduan kinerja para pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah, ataupun lembaga-lembaga masyarakat, juga perguruan tinggi yang turut berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif pusat dan daerah.
- b) Memberikan pendidikan atau pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan perempuan sehingga kaum perempuan mampu melaksanakan hak-haknya yang

tertinggal dari kaum laki-laki. Selanjutnya akan mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Sambas.

- c) Memberikan pelatihan dan dan bimbingan teknis terkait PUG kepada semua pejabat focal point OPD (inspektorat, Bakeuda, Bappeda, dan Dinas P3AP2KB) terdiri dari sekretaris dan ka subag sunram tentang analisis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang harus dibuktikan dengan lampiran dokumen Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement (GAP/GBS) dengan nara sumber tim pakar dari kementrian PPPA.
- d) Medorong peningkatan peran serta aktif seluruh anggota kelompok P2TP2A dan UPPA dalam mengedukasi masyarakat terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sedangkan Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah ditempuh langkah-langkah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada PUS (Pasangan Usia Muda) dan remaja akan manfaat Program KB ditingkat kecamatan hingga desa tentang pentingnya pengetahuan tentang Program Kependudukan dan KB
- b) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada para suami dari PUS terkait risiko dan manfaat KB Jangka Panjang (MKJP) dan kesertaan pria dalam KB.
- c) Melakukan penyuluhan terpadu dan terintegrasi tentang KESPRO sejak dini serta berbagai akibat buruk dari penyakit menular seksual kepada masyarakat sasaran yang juga mencakup sekolah/remaja;
- d) Pembinaan terhadap tenaga PLKB dan PKB dan membagi tugas sebagai pandamping bagi Kader PPKBD dan Sub PPKBD secara berkala serta berkelanjutan.
- e) Menjalin kemitraan dengan media massa serta pengadaan baliho, banner, leaflet dan kelender pada kecamatan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dalam mempromosikan/menggalakan Program KB

- f) Mendorong tersedianya prasarana untuk membentuk Rumah Data di Kampung KB
- g) Melakukan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan dan pelaksanaan pembentukannya serta pengadaan Pojok Kependudukan di sekolah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan urusan wajib, sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel 3 (Tabel.T-C.30).

Jika dilihat Tabel 3 (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) terdapat 8 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari tahun ke tahun menunjukkan: sebanyak 6 (75%) indikator tren meningkat; sebanyak 1 (12,5%) indikator tren menurun; sebanyak 1 (12,5%) indikator trenfluktuatif; dan sebanyak 1 (12,5%) indikator tren tetap. Nilai rata-rata capain kinerja tahun 2021-2024 berada pada interval 94%-111%. Kondisi ini memberikan gambaran konsistensi dari upaya yang dilakukan dalam mencapai IKU. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh

1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal

- b. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai
 - c. Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran masih kurang
 - d. Masih terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Masih rendahnya pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) Muda akan manfaat KB secara luas sebagai alat pengatur kelahiran,
 - b. Rendahnya Peserta KB Jangka Panjang (MKJP) dan rendahnya kesertaan pria dalam KB.
 - c. Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi relative masih rendah.
 - d. Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kader KB.
 - e. Intensitas pelaksanaan KIE melalui Media Massa masih rendah.
 - f. Belum sepenuhnya ada Rumah Data di Kampung KB.
 - g. Belum terkoordinasinya Pendidikan berwawasan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di sekolah melalui Sekolah Siaga Kependudukan dalam meningkatkan pengetahuan siswa.

Tabel 3.
(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun					Capaian Kinerja Tahun					Rata-rata capaian	Proyeksi realisasi 2025	Sumber	Ket.
(1)	(2)	(4)	2021	2022	2023	2024	Tren	2021	2022	2023	2024	Tren				
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,26 %	69,03 %	67,20 %	74,66 %	Naik	79%	105,7 %	100%	107,8 %	Naik	95%	73%	BPS	Bukan Indikator 2025
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) Klaster I	300 poin	336,05 poin	404,3 poin	618,71 poin	Naik	105,3 %	112,02 %	101%	123,74 %	Naik	111%	>600 poin	Penilaian Kemen PPPA	IKU 2025
3.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata anak per Wanita)	2,61 (Hasil PK 21)	2,61 (Hasil PK 21)	2,43 (Hasil PK 23)	2,44 (Hasil PK 24)	Turun	94,33 %	94,33 %	101,62 %	101,6 %	Tetap	98%	<2,44	Kemen Dukbangga/ BKKBN	IKK 2025
		2. Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)	57,3 % (Hasil PK 21)	56,6 % (Hasil PK 22)	60,5 % (Hasil PK 23)	69,25 % (Hasil PK 24)	Naik	101,67 %	99,58 %	105,55 %	119,81 %	Naik	107%	>61,8%	Kemen Dukbangga/ BKKBN	IKK 2025
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	19,7 % (Hasil PK 21)	12,3 % (Hasil PK 22)	8,4% (Hasil PK 23)	9,7% (Hasil PK 24)	Turun	38,52 %	96,64 %	127,59 %	114,16 %	Turun	94%	<10,5	Kemen Dukbangga/ BKKBN	IKK 2025
		4. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	38,6 (Hasil PK 21)	38,6 (Hasil PK 21)	28,7 (Hasil PK 23)	32,3 (Hasil PK 24)	Turun	48,03 %	48,03 %	87,01 %	127%	Naik	68%	<32,3	Kemen Dukbangga/ BKKBN	IKK 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun					Capaian Kinerja Tahun					Rata-rata capaian	Proyeksi realisasi 2025	Sumber	Ket.
(1)	(2)	(4)	2021	2022	2023	2024	Tren	2021	2022	2023	2024	Tren				
		(Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)														
		5. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) (Tahun)	21,1 (Hasil PK 21)	21,5 (Hasil PK 22)	21 (Hasil PK 23)	20,9 (Hasil PK 24)	Naik	101,8 6%	100%	102,3 3%	102,8 %	Naik	102%	<20,9	Kemen Dukbangga/ BKKBN	Bukan Indikator 2025
4.	Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	52,15 (Hasil PK 21)	55,85 (Hasil PK 22)	55,85 (Hasil PK 22)	59,24 (Hasil PK 24)	Naik	74,5 %	79,79 %	79,79 %	84,6 %	Naik	80%	>59,24	Kemen Dukbangga/ BKKBN	IKU 2025

Sumber: Renstra 2025-2029, Renstra 2021-2026, Laporan Kinerja 2024, diolah

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2021 yang sejalan dengan visi dan misi antara lain:

3) Isu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a). Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan meliputi sebagai berikut:

- i. Ketimpangan gender di Indonesia cukup tinggi, terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IPG kabupaten Sambas meningkat sebesar 0,04% (88,39%) pada tahun 2024 dibanding capaian tahun 2023 dan lebih besar sebesar 0,33% dari capaian Provinsi Kalimantan Barat (88,06%) (BPS, 2024). IDG kabupaten Sambas meningkat sebesar 7,46% (74,66%) pada tahun 2024 dibanding capaian tahun 2023 dan peningkatan ini lebih kecil dari peningkatan IDG Provinsi Kalimantan Barat yang meningkat sebesar 4,66%, namun masih di bawah capaian provinsi (77,71%) (BPS, 2024);
- ii. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terlihat dari melambatnya capaian pendapatan perempuan, dan persentase perempuan di legislatif;
- iii. Masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang

responsif gender di tingkat nasional dan daerah. Selain itu 7 (tujuh) Prasyarat PUG belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh K/L dan pemerintah daerah;

- iv. Tingginya Kepala Rumah Tangga Perempuan pada kelompok pengeluaran 40% terendah (miskin) dan kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan; dan
- v. Menurunnya pendapatan perempuan terutama pada pelaku usaha Mikro, UKMM/IKM.

b) Permasalahan terkait pemenuhan hak anak meliputi sebagai berikut:

- i. Capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih rendah, seperti Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; puskesmas ramah anak, kampung anak sejahtera; tingkat partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah; sekolah ramah anak; pusat kreatifitas anak; Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS); media informasi layak anak yaitu TeSA (Telepon Sahabat Anak) dan PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak); dan daerah mengembangkan model dan pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP), serta pelatihan Pelopor dan Pelapor (2P).

c) Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi sebagai berikut:

- i. Belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- ii. Belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- iii. Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam mendorong/memandu partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

d) Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan meliputi sebagai berikut:

- i. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spektrum yang semakin luas;
- ii. Makin tingginya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk eksploitasi seksual komersial dan kerja paksa, bukan saja antar negara namun juga antar daerah;
- iii. Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal;
- iv. Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan;
- v. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan pada situasi konflik dan bencana, dan perlindungan terhadap kelompok lansia dan difabel yang mendapatkan diskriminasi atau perlakuan kurang adil;
- vi. Lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan; dan
- vii. Munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan perempuan.

e) Permasalahan terkait perlindungan khusus anak meliputi sebagai berikut:

- i. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, seksual, maupun psikis, pada ranah privat maupun ranah publik;
- ii. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti: pekerja anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH), perkawinan anak, anak terlantar, serta anak berkebutuhan khusus; dan
- iii. Munculnya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat diperkirakan dapat berakibat terhadap peningkatan kasus-kasus perlindungan khusus anak.

4) Isu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan diantaranya struktur penduduk Kabupaten Sambas dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Sambas mencapai 67,55% pada tahun 2023 dan masih berada diposisi Bonus Demografi pada tahun 2024 (Sambas Dalam Angka, BPS, 2024).
- b) Isu Strategis terkait pemenuhan layanan dasar:
- i. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan dari 346 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (hasil SP2010) menjadi 189 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 (hasil Long Form SP2020) atau turun sebesar 45 persen <https://www.bps.go.id> dalam sepuluh tahun terakhir. Meskipun demikian, penurunan AKI di Indonesia masih terus diupayakan, karena tingginya AKI di Indonesia masih setara dengan beberapa negara di Afrika (BPS, 2023). Target penurunan AKI di Indonesia masih terus menjadi prioritas. Upaya pencapaian target RPJMN tahun 2024 untuk AKI yang sebesar 183 kematian per 100.000 kelahiran hidup terlihat optimis untuk di capai. Namun untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Target 3.1, yaitu pada tahun 2030 mengurangi rasio AKI hingga kurang dari 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup, upaya penurunan AKI di Indonesia perlu lebih dioptimalkan. Sejalan dengan progres AKI, Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia juga mengalami penurunan dari 26 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (hasil SP2010) menjadi 16,85 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 (hasil SP2020) (BPS, 2023). Meskipun demikian, untuk mencapai Target 3.2 pada SDGs, pelayanan kesehatan untuk anak dan pengurangan risiko penyebab kematian bayi juga perlu terus ditingkatkan.
 - ii. Penggunaan kontrasepsi modern (*modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) tahun 2024 di Indonesia tercatat sebesar 60,9%. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada jarak yang perlu diatasi untuk mencapai target yang ditetapkan, yaitu 63,41%. BKKBN berkomitmen untuk meningkatkan mCPR dan menurunkan angka kelahiran total (TFR) menjadi 2,1 dan

mengurangi disparitas TFR per wilayah. Diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mCPR, diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui penggerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern. Selain itu, untuk menyasar pasangan usia muda/ pasangan millennial, perlu peningkatan kesadaran generasi muda terkait kesehatan reproduksi.

- iii. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (*unmet need*) di Indonesia dikategorikan masih tinggi. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, *unmet need* terus mengalami penurunan, tercatat tahun 2023 sebesar 11,5% (Pemuktahiran PK, 2023) turun sebesar 3,2% (14,7%) dari tahun 2022. Dua puluh tiga persen wanita tidak mau ber-KB Karena alasan kekhawatiran terhadap efek samping, sedangkan pada kalangan pria, ada 32 persen pria yang dirinya ataupun isterinya tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan tidak ingin ber-KB;
- iv. Prevalensi *stunting* masih tinggi: *Stunting* (gagal tumbuh) merupakan ancaman utama terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menurun sebesar 1,27% (19,8%) dari tahun 2023 sebesar 21,5%, yang melampaui proyeksi Bappenas sebesar 20,1%. Pemerintah menargetkan penurunan angka *stunting* menjadi 14,2% pada tahun 2029, dengan upaya lebih keras diperlukan untuk mencapai target ini. Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada, termasuk perlunya koordinasi lintas sektor dan intervensi yang lebih efektif, terutama untuk kelompok balita berisiko tinggi. Kemudian salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian diantaranya perlunya edukasi/sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai bekal memasuki kehidupan berkeluarga, agar para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, memeriksakan kandungan minimal empat kali selama

kehamilan (program 1.000 HPK), serta peningkatan pemahaman orangtua mengenai pola asuh yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan.

- c) Isu Strategis terkait membangun kebudayaan dan karakter bangsa:
- i. Rendahnya keluarga yang mengetahui fungsi keluarga: Peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan, hal ini terlihat dari jumlah keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang 8 fungsi keluarga baru mencapai 38 persen (SKAP 2018). Adapun 8 fungsi keluarga tersebut adalah: (1) Fungsi Agama; (2) Fungsi Sosial Budaya; (3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang; (4) Fungsi Perlindungan; (5) Fungsi Reproduksi; (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan; (7) Fungsi Ekonomi, dan (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan (Peraturan Pemerintah No: 87 Tahun 2024 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga). Cita-cita untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berbudaya dan berkarakter dapat dilakukan melalui pendidikan, pengasuhan, pembiasaan dan keteladanan dalam keluarga. Keluarga bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terkait nilai toleransi dan saling menghargai, gotong royong, sopan santun, kebersamaan dan kerukunan, kepedulian terhadap sesama, serta cinta tanah air (nasionalisme). Hal ini dapat didukung oleh kegiatan pembangunan keluarga yang mensosialisasikan serta membudayakan 8 fungsi keluarga sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral dan karakter yang bermartabat; dan
 - ii. Perkawinan anak di Indonesia masih tinggi meskipun ada kemajuan, dengan prevalensi perkawinan anak di Indonesia tertinggi kedua di Asia Tenggara dan ke-4 di dunia. Data UNICEF menempatkan Indonesia di peringkat kedelapan di dunia dalam hal persentase perkawinan usia anak di bawah usia 18 tahun. Perkawinan usia anak di Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,5 poin persen dalam 10 tahun terakhir, namun masih tergolong lambat. Untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030, diperlukan upaya sistemik dan terpadu. Angka perkawinan anak pada 2022 mencatat 8.804 pasangan di bawah usia 19 tahun, menurun menjadi

5.489 pasangan pada 2023, dan kembali menurun menjadi 4.150 pasangan pada tahun 2024. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di sekolah-sekolah dan madrasah berperan penting dalam pencegahan perkawinan anak. Kasus pernikahan usia anak banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dan telah menjadi perhatian internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan anak yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia anak, kehamilan pada usia yang sangat muda, gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran, infeksi penyakit menular seksual, serta risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia yang relatif sangat muda. Langkah penanggulangan isu ini diantaranya dapat melalui penanaman norma sosial dan budaya praktik penundaan usia menikah melalui keluarga (orang tua), kelompok kegiatan, pendidikan/sosialisasi kesehatan reproduksi melalui sekolah/guru, serta tokoh agama/tokoh masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas serta mengacu kepada RKPD Kabupaten Sambas. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Sambas disusun melalui tahapan – tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026. Perencanaan yang dilakukan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum perangkat daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang

sehingga terjadi keterpaduan rancangan Renja perangkat daerah (proses *bottom-up* dan *top-down*). Rangkaian tahapan penyusunan RKPD dan Renja OPD berpedoman pada Permendagri 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD diambil berdasarkan analisis kebutuhan dari tiap bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas, namun seiring dengan berjalannya waktu terdapat perubahan-perubahan kegiatan karena disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diprioritaskan termasuk besaran pagu anggaran yang bertambah/berkurang dari usulan awal.

Tabel 5.
(Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
Tujuan	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas	Kabupaten Sambas	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 3. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 4. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	89,29 0,409 61,05 66,11	14.648.160.343,40	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas	Kabupaten Sambas	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 3. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 4. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	89,29 0,409 61,05 66,11	14.648.160.343,40
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Sambas	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas	100%	4.184.216.438,40	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Sambas	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas	100%	4.184.216.438,40
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.412.692,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	15.412.692,00
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2.070.953,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2.070.953,00
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.190.453,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.190.453,00
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.190.431,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.190.431,00
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.190.431,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.190.431,00
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Sambas	"Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	2.190.431,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kabupaten Sambas	"Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 dokumen	2.190.431,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sambas	Perubahan DPA-SKPD"	1 Laporan	2.389.562,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sambas	Perubahan DPA-SKPD"	1 Laporan	2.389.562,00
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.190.431,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.190.431,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.499.318.373,48	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.499.318.373,48
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sambas	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33 Orang/bulan	3.120.861.075,48	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sambas	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33 Orang/bulan	3.120.861.075,48
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	23.895.625,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	23.895.625,00
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sambas	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dokumen	44.605.168,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sambas	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dokumen	44.605.168,00
2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Sambas	Pelaksanaan Tugas ASN"	1 Dokumen	1.991.301,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Sambas	Pelaksanaan Tugas ASN"	1 Dokumen	1.991.301,00
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	1.991.301,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	1.991.301,00
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.991.301,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.991.301,00
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.991.301,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.991.301,00
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.991.301,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.991.301,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	"Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	100%	23.497.358,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	"Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	100%	23.497.358,00
2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sambas	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD"	1 Dokumen	1.991.301,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sambas	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD"	1 Dokumen	1.991.301,00
2.08.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.982.604,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.982.604,00
2.08.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sambas	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	2.190.431,00	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sambas	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	2.190.431,00
2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.588.692,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.588.692,00
2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.991.301,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1.991.301,00
2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sambas	"Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	1 Laporan	4.779.124,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sambas	"Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	1 Laporan	4.779.124,00
2.08.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sambas	Milik Daerah SKPD"	1 Dokumen	5.973.905,00	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sambas	Milik Daerah SKPD"	1 Dokumen	5.973.905,00
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	"Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	100%	33.852.133,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	"Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	100%	33.852.133,00
2.08.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Sambas	SKPD"	5 unit	7.965.208,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Sambas	SKPD"	5 unit	7.965.208,00
2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		9.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		9.000.000,00
2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	3.982.604,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	3.982.604,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.973.905,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.973.905,00
2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Sambas	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.965.208,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Sambas	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.965.208,00
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 orang	7.965.208,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 orang	7.965.208,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	183.518.401,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Sambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	183.518.401,00
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 paket	27.878.229,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 paket	27.878.229,00
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27 paket	19.913.021,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27 paket	19.913.021,00
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	22 paket	21.904.323,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	22 paket	21.904.323,00
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 paket	31.860.834,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 paket	31.860.834,00
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Sambas	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	25 Paket	35.843.438,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Sambas	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	25 Paket	35.843.438,00
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sambas	"Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Dokumen	4.301.212,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sambas	"Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Dokumen	4.301.212,00
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Sambas	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	-	1.991.301,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Sambas	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	-	1.991.301,00
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Laporan	39.826.043,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Laporan	39.826.043,00
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	316.617.039,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Sambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	316.617.039,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 unit	79.652.086,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 unit	79.652.086,00
2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Sambas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 unit	9.956.510,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Sambas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 unit	9.956.510,00
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 unit	7.965.208,00	Pengadaan Mebel	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 unit	7.965.208,00
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 unit	7.965.208,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 unit	7.965.208,00
2.08.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 unit	79.652.086,00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 unit	79.652.086,00
2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sambas	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit	99.565.108,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sambas	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit	99.565.108,00
2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	19.913.021,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	19.913.021,00
2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	11.947.812,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	11.947.812,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sambas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	272.211.004,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sambas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	272.211.004,00
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	2.190.431,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	2.190.431,00
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	20.869.532,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	20.869.532,00
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 laporan	17.125.198,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 laporan	17.125.198,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	223.025.843,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	223.025.843,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sambas	"Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	100%	118.681.601,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Sambas	"Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	100%	118.681.601,00
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sambas	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"	6 unit	1.991.301,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sambas	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan"	6 unit	1.991.301,00
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Sambas	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 unit	3.186.082,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Sambas	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 unit	3.186.082,00
2.08.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 unit	3.982.604,00	Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 unit	3.982.604,00
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 unit	11.947.812,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 unit	11.947.812,00
2.08.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 unit	5.973.905,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 unit	5.973.905,00
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Unit	59.739.064,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Unit	59.739.064,00
2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sambas	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 unit	19.913.021,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sambas	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 unit	19.913.021,00
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	11.947.812,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	11.947.812,00
2.08.01.2.13	Penataan Organisasi	Kabupaten Sambas	Persentase Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas	100%	21.107.836,92	Penataan Organisasi	Kabupaten Sambas	Persentase Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas	100%	21.107.836,92

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
			Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
2.08.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Sambas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	2 dokumen	21.107.836,92	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kabupaten Sambas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	2 dokumen	21.107.836,92
Sasaran	S.1. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Kabupaten Sambas	1. Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)	350 poin	3.348.462.049,00	S.1. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Kabupaten Sambas	1. Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)	350 poin	3.348.462.049,00
			2. Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	625 poin				2. Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	625 poin	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kabupaten Sambas			3.348.462.049,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kabupaten Sambas			3.348.462.049,00
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kabupaten Sambas	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	5% 73,28%	784.795.793,00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kabupaten Sambas	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	5% 73,28%	784.795.793,00
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki focal point atau tim PUG aktif	3 Perangkat Daerah	156.959.158,00	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki focal point atau tim PUG aktif	3 Perangkat Daerah	156.959.158,00
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	18.835.100,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	18.835.100,00
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	17.265.507,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	17.265.507,00
2.08.02.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	25.113.465,00	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	25.113.465,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan	6 Lembaga	26.683.057,00	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan	6 Lembaga	26.683.057,00
2.08.02.2.01.0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	23.543.874,00	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	23.543.874,00
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	28.252.648,00	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	28.252.648,00
2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	1 Orang	17.265.507,00	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	1 Orang	17.265.507,00
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah organisasi kemasyarakatan perempuan yang menerima program penguatan kapasitas di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	1 Organisasi	392.397.897,00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah organisasi kemasyarakatan perempuan yang menerima program penguatan kapasitas di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	1 Organisasi	392.397.897,00
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Sambas	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2 Lembaga	43.163.769,00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Sambas	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	2 Lembaga	43.163.769,00
2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	1 Lembaga	51.011.727,00	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	1 Lembaga	51.011.727,00
2.08.02.2.02.0006	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	4 Lembaga	62.783.664,00	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	4 Lembaga	62.783.664,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.02.2.02.0007	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	66.707.642,00	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	66.707.642,00
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	350 orang	78.479.579,00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	350 orang	78.479.579,00
2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	300 orang	90.251.516,00	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	300 orang	90.251.516,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang memperoleh penguatan kapasitas	4 Lembaga	235.438.738,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang memperoleh penguatan kapasitas	4 Lembaga	235.438.738,00
2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	4 Lembaga	47.087.748,00	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	4 Lembaga	47.087.748,00
2.08.02.2.03.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	42.378.973,00	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 dokumen	42.378.973,00
2.08.02.2.03.0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	49.442.135,00	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	49.442.135,00
2.08.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Kabupaten Sambas	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1 orang	51.796.522,00	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Kabupaten Sambas	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1 orang	51.796.522,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.02.2.03.0011	mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meni	Kabupaten Sambas	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	1 Lembaga	44.733.360,00	mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meni	Kabupaten Sambas	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	1 Lembaga	44.733.360,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten Sambas	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85%	523.197.195,00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten Sambas	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85%	523.197.195,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kader, fasilitator, atau relawan masyarakat yang diedukasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	400 Orang	167.423.102,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kader, fasilitator, atau relawan masyarakat yang diedukasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	400 Orang	167.423.102,00
2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	33.484.622,00	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	33.484.622,00
2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.439.234,00	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	23.439.234,00
2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Kabupaten Sambas	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	175 orang	38.507.313,00	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Kabupaten Sambas	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	175 orang	38.507.313,00
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Lembaga	36.833.082,00	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Lembaga	36.833.082,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.03.2.01.0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	1 Kebijakan	35.158.851,00	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	1 Kebijakan	35.158.851,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan yang diberikan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kabupaten/Kota	1 Orang	251.134.654,00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan yang diberikan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kabupaten/Kota	1 Orang	251.134.654,00
2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Kabupaten Sambas	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	3 Orang	35.158.852,00	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Kabupaten Sambas	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	3 Orang	35.158.852,00
2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1 Orang	37.670.198,00	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1 Orang	37.670.198,00
2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	3 Orang	30.136.158,00	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	3 Orang	30.136.158,00
2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1 Orang	27.624.812,00	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1 Orang	27.624.812,00
2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	3 Orang	32.647.505,00	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	3 Orang	32.647.505,00
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	3 Orang	42.692.891,00	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	3 Orang	42.692.891,00
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan	3 Orang	45.204.238,00	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan	Kabupaten Sambas	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan	3 Orang	45.204.238,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
	Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota			Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota		
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memperoleh penguatan kapasitas	1 Orang	104.639.439,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memperoleh penguatan kapasitas	1 Orang	104.639.439,00
2.08.03.2.03.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	12.556.733,00	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	12.556.733,00
2.08.03.2.03.0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1 Laporan	21.974.282,00	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	1 Laporan	21.974.282,00
2.08.03.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	1 Orang	25.113.465,00	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	1 Orang	25.113.465,00
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	5 orang	29.299.043,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	5 orang	29.299.043,00
2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	15.695.916,00	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	15.695.916,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kabupaten Sambas	1. Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar 2. Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga	10% 110	732.476.073,00	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kabupaten Sambas	1. Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar 2. Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga	10% 110	732.476.073,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi tentang kesetaraan gender dan hak anak	5 keluarga	344.263.754,00	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi tentang kesetaraan gender dan hak anak	5 keluarga	344.263.754,00
2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Lembaga	55.082.201,00	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Lembaga	55.082.201,00
2.08.04.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kebijakan	134.262.864,00	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kebijakan	134.262.864,00
2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Kabupaten Sambas	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	72.295.388,00	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Kabupaten Sambas	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	72.295.388,00
2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen	82.623.301,00	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen	82.623.301,00
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga dan anak yang memperoleh peningkatan kapasitas	1 Lembaga	227.067.583,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga dan anak yang memperoleh peningkatan kapasitas	1 Lembaga	227.067.583,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.04.2.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52.225.545,00	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52.225.545,00
2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	36.330.813,00	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	36.330.813,00
2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	38.601.489,00	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	38.601.489,00
2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2 Lembaga	52.225.544,00	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2 Lembaga	52.225.544,00
2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	47.684.192,00	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	47.684.192,00
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jenis layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	3 Layanan	161.144.736,00	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jenis layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	3 Layanan	161.144.736,00
2.08.04.2.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	2 Orang	32.228.947,00	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	2 Orang	32.228.947,00
2.08.04.2.03.0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	1 Orang	30.617.500,00	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	1 Orang	30.617.500,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	1 Orang	37.063.289,00	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	1 Orang	37.063.289,00
2.08.04.2.03.0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	1 Orang	27.394.605,00	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	1 Orang	27.394.605,00
2.08.04.2.03.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	1 Orang	33.840.395,00	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	1 Orang	33.840.395,00
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kabupaten Sambas	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	55%	156.959.159,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kabupaten Sambas	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	55%	156.959.159,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak	1 Data	156.959.159,00	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak	1 Data	156.959.159,00
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	53.366.114,00	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	53.366.114,00
2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Kabupaten Sambas	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	1 Lembaga	54.935.706,00	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Kabupaten Sambas	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	1 Lembaga	54.935.706,00
2.08.05.2.01.0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Kabupaten Sambas	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 Dokumen	48.657.339,00	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Kabupaten Sambas	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	1 Dokumen	48.657.339,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Sambas	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,76	627.836.634,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Sambas	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,76	627.836.634,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga PHA yang terbentuk	35 Unit	156.959.158,00	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga PHA yang terbentuk	35 Unit	156.959.158,00
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Lembaga	32.961.423,00	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Lembaga	32.961.423,00
2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	54.935.705,00	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	54.935.705,00
2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	31.391.832,00	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	31.391.832,00
2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	37.670.198,00	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	37.670.198,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	2 kegiatan	470.877.476,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	2 kegiatan	470.877.476,00
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Kabupaten Sambas	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	50 Orang	141.263.244,00	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Kabupaten Sambas	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	50 Orang	141.263.244,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek			Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek		
2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	70.631.621,00	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokume n	70.631.621,00
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	42 Lembaga	75.340.396,00	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	42 Lembag a	75.340.396,00
2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	89.466.720,00	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	89.466.720,00
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	17 Lembaga	94.175.495,00	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	17 Lembag a	94.175.495,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kabupaten Sambas	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif 3. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	100% 100% 68,29	523.197.195,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kabupaten Sambas	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif 3. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	100% 100% 68,29	523.197.195,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	1 dokumen	209.278.878,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	1 dokume n	209.278.878,00
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2 Dokumen	31.391.832,00	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2 Dokume n	31.391.832,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2 Kegiatan	27.206.254,00	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	2 Kegiatan	27.206.254,00
2.08.07.2.01.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	1 Laporan	29.299.043,00	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	1 Laporan	29.299.043,00
2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	10 Dokumen	25.113.465,00	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	10 Dokumen	25.113.465,00
2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	80 Orang	41.855.776,00	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	80 Orang	41.855.776,00
2.08.07.2.01.0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	1 Kebijakan	54.412.508,00	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	1 Kebijakan	54.412.508,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Layanan yang diberikan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45 orang	183.119.018,00	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Layanan yang diberikan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45 orang	183.119.018,00
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	45 Orang	23.805.474,00	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	45 Orang	23.805.474,00
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	45 Orang	23.805.472,00	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	45 Orang	23.805.472,00
2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	3 Orang	23.805.472,00	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	3 Orang	23.805.472,00
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan	2 Orang	23.805.472,00	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan	2 Orang	23.805.472,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
			Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1 Orang	18.311.902,00	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	1 Orang	18.311.902,00
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	45 Orang	23.805.472,00	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	45 Orang	23.805.472,00
2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	23.805.472,00	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	23.805.472,00
2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	45 Orang	21.974.282,00	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	45 Orang	21.974.282,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	17 lembaga	130.799.299,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	17 lembaga	130.799.299,00
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kabupaten Sambas	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen	20.927.887,00	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kabupaten Sambas	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen	20.927.887,00
2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	17.003.909,00	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	17.003.909,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.619.895,00	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	19.619.895,00
2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	17.003.909,00	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	17.003.909,00
2.08.07.2.03.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.003.909,00	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.003.909,00
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	20 Orang	22.235.881,00	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	20 Orang	22.235.881,00
2.08.07.2.03.0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2 Lembaga	17.003.909,00	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	2 Lembaga	17.003.909,00
Sasaran	S.2. Meningkatnya pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga	Kabupaten Sambas	1. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,81 62,16	7.115.481.856,00	S.2. Meningkatnya pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga	Kabupaten Sambas	1. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 2. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59,81 62,16	7.115.481.856,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kabupaten Sambas			7.115.481.856,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kabupaten Sambas			7.115.481.856,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kabupaten Sambas	1. Angka Kelahiran Total Total Fertility finte/ TFR) 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific NertiliJ State/ASFR 15-19 3. Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	2,33 jiwa 28,68 per 1000 wus 15-19 tahun 85,8%	1.883.509.903,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kabupaten Sambas	1. Angka Kelahiran Total Total Fertility finte/ TFR) 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific NertiliJ State/ASFR 15- 19 3. Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	2,33 jiwa 28,68 per 1000 wus 15- 19 tahun 85,8%	1.883.509.903,00
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Kabupaten Sambas	Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal	19 dokumen	1.035.930.447,00	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	Kabupaten Sambas	Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal	19 dokume n	1.035.930.447,00
2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kabupaten Sambas	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	5 dokumen	88.054.086,00	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kabupaten Sambas	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	5 dokume n	88.054.086,00
2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	20 Laporan	88.054.088,00	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	20 Laporan	88.054.088,00
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Laporan	82.874.436,00	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Laporan	82.874.436,00
2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	88.054.088,00	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokume n	88.054.088,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kabupaten Sambas	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	5 satuan pendidikan	82.874.436,00	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Kabupaten Sambas	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	5 satuan pendidikan	82.874.436,00
2.14.02.2.01.0028	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10 laporan	82.874.436,00	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10 laporan	82.874.436,00
2.14.02.2.01.0029	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Kabupaten/Kota	88.054.088,00	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Kabupaten/Kota	88.054.088,00
2.14.02.2.01.0030	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10 laporan	82.874.436,00	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10 laporan	82.874.436,00
2.14.02.2.01.0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	88.054.088,00	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	88.054.088,00
2.14.02.2.01.0032	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	Kabupaten Sambas	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 dokumen	103.593.045,00	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	Kabupaten Sambas	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 dokumen	103.593.045,00
2.14.02.2.01.0033	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	82.874.436,00	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 dokumen	82.874.436,00
2.14.02.2.01.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya	Kabupaten Sambas	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan	1 Perangkat Daerah	77.694.784,00	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan	Kabupaten Sambas	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan	1 Perangkat	77.694.784,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah		Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah			alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah		Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	at Daerah	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Cakupan Rumah Data Kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan Kampung KB	6 unit	847.579.456,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Cakupan Rumah Data Kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan Kampung KB	6 unit	847.579.456,00
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	6 laporan	67.806.358,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	6 laporan	67.806.358,00
2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	6 dokumen	59.330.562,00	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	6 dokumen	59.330.562,00
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	19 dokumen	72.044.254,00	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	19 dokumen	72.044.254,00
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	6 laporan	72.044.254,00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	6 laporan	72.044.254,00
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	50.854.767,00	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	50.854.767,00
2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Sambas	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 dokumen	59.330.562,00	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Kabupaten Sambas	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 dokumen	59.330.562,00
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	6 laporan	59.330.562,00	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	6 laporan	59.330.562,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.14.02.2.02.0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 dokumen	67.806.356,00	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 dokumen	67.806.356,00
2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	1 dokumen	59.330.562,00	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	1 dokumen	59.330.562,00
2.14.02.2.02.0024	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 dokumen	50.854.767,00	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 dokumen	50.854.767,00
2.14.02.2.02.0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 dokumen	50.854.767,00	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 dokumen	50.854.767,00
2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kabupaten Sambas	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	6 unit	50.854.767,00	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kabupaten Sambas	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	6 unit	50.854.767,00
2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	59.330.562,00	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	59.330.562,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kabupaten Sambas	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 dokumen	67.806.356,00	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kabupaten Sambas	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 dokumen	67.806.356,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kabupaten Sambas	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) 2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) 3. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	61,9% 10% 11%	1.151.033.830,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kabupaten Sambas	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) 2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) 3. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	61,9% 10% 11%	1.151.033.830,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Sambas	Jumlah Kecamatan yang mendukung program Bangga Kencana	19 Kecamatan	310.779.134,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Sambas	Jumlah Kecamatan yang mendukung program Bangga Kencana	19 Kecamatan	310.779.134,00
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	6 laporan	46.616.870,00	Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	6 laporan	46.616.870,00
2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 unit	62.155.827,00	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 unit	62.155.827,00
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 laporan	34.185.705,00	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 laporan	34.185.705,00
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	19 laporan	43.509.079,00	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	19 laporan	43.509.079,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	19 dokumen	43.509.079,00	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	19 dokumen	43.509.079,00
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Sambas	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	6 dokumen	40.401.287,00	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Sambas	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	6 dokumen	40.401.287,00
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisasi	40.401.287,00	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisasi	40.401.287,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kabupaten Sambas	Jumlah PKB yang berkinerja baik	27 orang	345.310.149,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kabupaten Sambas	Jumlah PKB yang berkinerja baik	27 orang	345.310.149,00
2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kabupaten Sambas	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	19 unit	93.233.741,00	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kabupaten Sambas	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	19 unit	93.233.741,00
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	200 orang	86.327.537,00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	200 orang	86.327.537,00
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	193 organisasi	86.327.537,00	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kabupaten Sambas	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,	193 organisasi	86.327.537,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
			Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	19 laporan	79.421.334,00	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	19 laporan	79.421.334,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Cakupan Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100%	264.737.781,00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sambas	Cakupan Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100%	264.737.781,00
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	54 Laporan	19.855.331,00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	54 Laporan	19.855.331,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1392 orang	19.855.334,00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1392 orang	19.855.334,00
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 Laporan	19.855.334,00	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5 Laporan	19.855.334,00
2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Dokumen	19.855.334,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Dokumen	19.855.334,00
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit	21.179.022,00	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	19 Unit	21.179.022,00
2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	760 orang	19.855.334,00	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	760 orang	19.855.334,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Laporan	19.855.334,00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Laporan	19.855.334,00
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kabupaten Sambas	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	54 orang	23.826.400,00	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kabupaten Sambas	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	54 orang	23.826.400,00
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	21.179.022,00	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	21.179.022,00
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kabupaten Sambas	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	10 orang	19.855.334,00	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kabupaten Sambas	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	10 orang	19.855.334,00
2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 orang	19.855.334,00	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 orang	19.855.334,00
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kabupaten Sambas	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	285 orang	19.855.334,00	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kabupaten Sambas	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	285 orang	19.855.334,00
2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kabupaten Sambas	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	38 kegiatan	19.855.334,00	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kabupaten Sambas	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	38 kegiatan	19.855.334,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Sambas	Persentase peserta KB baru	21,77%	230.206.766,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kabupaten Sambas	Persentase peserta KB baru	21,77%	230.206.766,00
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten Sambas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	195 unit	103.593.044,00	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten Sambas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	195 unit	103.593.044,00
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di	Kabupaten Sambas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	195 kampung	69.062.030,00	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di	Kabupaten Sambas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	195 kampung	69.062.030,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
	Kampung Keluarga Berkualitas		(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			Kampung Keluarga Berkualitas		(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		
2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	34 Dokumen	57.551.692,00	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	34 Dokumen	57.551.692,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kabupaten Sambas	1. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga 2. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja 3. Indeks Lansia Berdaya 4. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri 5. Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting 6. Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK	78% 83,6 58,0 22,6% 90% 90%	4.080.938.123,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kabupaten Sambas	1. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga 2. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja 3. Indeks Lansia Berdaya 4. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri 5. Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting 6. Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK	78% 83,6 58,0 22,6% 90% 90%	4.080.938.123,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Sambas	Cakupan Anggota kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL. UPPKS, PIK R) yang di bina	57,6%	530.521.956,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Sambas	Cakupan Anggota kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL. UPPKS, PIK R) yang di bina	57,6%	530.521.956,00
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kabupaten Sambas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	24 Keluarga	34.483.928,00	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kabupaten Sambas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	24 Keluarg a	34.483.928,00
2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Kabupaten Sambas	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	19 Kegiatan	34.483.927,00	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Kabupaten Sambas	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	19 Kegiata n	34.483.927,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19 Laporan / Dokumen	37.136.537,00	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kabupaten Sambas	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	19 Laporan / Dokumen	37.136.537,00
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	195 Laporan	37.136.537,00	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	195 Laporan	37.136.537,00
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	19 unit	37.136.537,00	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Sambas	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	19 unit	37.136.537,00
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Sambas	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	416 orang	37.136.537,00	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Sambas	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	416 orang	37.136.537,00
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	380 orang	34.483.927,00	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kabupaten Sambas	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	380 orang	34.483.927,00
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	19 Laporan	37.136.537,00	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	19 Laporan	37.136.537,00
2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	19 Dokumen	34.483.927,00	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	19 Dokumen	34.483.927,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1248 orang	37.136.537,00	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1248 orang	37.136.537,00
2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	19 Laporan	31.831.317,00	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	19 Laporan	31.831.317,00
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	90 kelompok	37.136.537,00	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	90 kelompok	37.136.537,00
2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	31.831.317,00	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kabupaten Sambas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	31.831.317,00
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	90 kelompok	37.136.537,00	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kabupaten Sambas	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	90 kelompok	37.136.537,00
2.14.04.2.01.0029	Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Kabupaten Sambas	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	2 Laporan	31.831.317,00	Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Kabupaten Sambas	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	2 Laporan	31.831.317,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Kabupaten Sambas	Cakupan PUS peserta KB Kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R)	88,53%	3.550.416.167,00	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Kabupaten Sambas	Cakupan PUS peserta KB Kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R)	88,53%	3.550.416.167,00

Kode Belanja	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kabupaten Sambas	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	416 Laporan	1.565.039.771,00	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kabupaten Sambas	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	416 Laporan	1.565.039.771,00
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kabupaten Sambas	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	416 Laporan	1.598.911.556,00	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kabupaten Sambas	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	416 Laporan	1.598.911.556,00
2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	6 Laporan	210.168.313,00	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	6 Laporan	210.168.313,00
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	19 Laporan	176.296.527,00	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Kabupaten Sambas	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	19 Laporan	176.296.527,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai hasil musyawarah rencana pembangunan Kabupaten Sambas yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2025, dimana terdapat 15 kegiatan hasil musrenbang yang di dengan skala prioritas 1-5 disampaikan dalam Forum OPD, berturut-turut menurut prioritas yaitu sebesar: 6,6%; 20%; 20%; 26,7%; dan 26,7%. Hasil pembahas lanjut hasil melalui forum OPD yang menyesuaikan hasil musrenbang tingkat kecamatan dengan tugas pokok dan fungsi didapat hasil seluruh usulan diterima. (Tabel 6).

Selain musrenbang, usulan program dan kegiatan masyarakat juga diakomudir melalui masa reses DPRD dalam bentuk Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Pasal 78 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai masukan dalam perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Hal ini sesuai Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan, Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD. Adapun rekapitulasi Pokir yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 6.
(Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2025

No. Prio	Usulan Kegiatan	Kode Rincian	Volume	Lokasi	Jumlah	Lokasi (Desa/Kec)		Keterangan	
PEMERINTAHAN									
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					545.000.000				
1	pelatihan PKK dan PembedayaanPerempuan	070.175-011	1 Paket	Desa Perigi Landu	50.000.000	Perigi Landu	Sejangkung	1	Setuju
2	Pelatihan dan Penyuluhan KelompokPerempuan (Pelatihan Menjahit)	010.004-005	1 Paket	Desa Pangkalan Bemban	25.000.000	PangkalanBemban	Selakau	1	Setuju
2	Pelatihan bagi TPK, PPKBD dan SubPPKBD	030.054-019	2 Kelompok	Tebas Kuala	50.000.000	Tebas Kuala	Tebas	1	Setuju
2	Pelatihan Menjahit Kader PKK	051.124-012	3 Kegiatan	Desa Semperiuk A	50.000.000	Semperiuk A	Jawai Selatan	1	Setuju
3	Pelatihan Menjahit bagi Ibu-Ibu KelompokPenjahit	020.018-020	1 Paket	Desa Harapan	50.000.000	Harapan	Pemangkat	1	Setuju
3	Pelatihan/ penyuluhan PemberdayaanPerempuan	030.044-014	50 Orang	Desa SungaiKelambu	10.000.000	Sungai Kelambu	Tebas	1	Setuju
3	Sosialisasi kenakalan remaja dan bahayanarkoba dan mencegah pernikahan dini	043.102-010	200 Orang	Desa Jirak	50.000.000	Jirak	Sajad	1	Setuju
4	PENGASUHAN BERSAMA ATAU BINA KELUARGA BALITA (BLB)	010.008-018	1 Paket	Twi Mentibar	10.000.000	Twi Mentibar	Selakau	1	Setuju
4	Penyuluhan terkait Kenakalan Remaja	030.048-055	1 Kegiatan	Tebas Sungai	20.000.000	Tebas Sungai	Tebas	1	Setuju
4	Penyuluhan Kekerasan Dalam RumahTangga (KDRT)	040.065-012	1 Paket	Desa Sungai Rambah	10.000.000	Sei Rambah	Sambas	1	Setuju
4	FASILITASI KEGIATAN BAGI KELOMPOK PEREMPUAN (KWT)	043.104-024	1 Paket	Desa Mekar Jaya	20.000.000	Mekar Jaya	Sajad	4	Ditangguhkan
5	Penyuluhan bagi perempuan dan anak	030.035-017	1 Kali	Desa Maribas	30.000.000	Maribas	Tebas	1	Setuju
5	Peningkatan Kapasitan PKK	051.125-016	1 Kegiatan	Desa Sarilaba A	100.000.000	Sarilaba A	Jawai Selatan	1	Setuju
5	Pembinaan perlindungan anak	051.127-013	1 Paket	Desa Suah Api	20.000.000	Suah Api	Jawai Selatan	1	Setuju
5	Peningkatan Kapasitas Bagi Tim SatgasDesa Penanganan Stunting	060.147-009	2 Kegiatan	Desa Sayang Sedayu	50.000.000	Sayang Sedayu	Teluk Keramat	1	Setuju

Tabel 7.
(Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Telaah Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	REKOMEN DASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMEN DASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
87	952062	25-04-2024	JUNAIDI. MA, S. Sos	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perempuan	Pelatihan/bimtek konseling keluarga dan hak anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Sambas, Kab. Sambas	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Usulan disetujui	Proses Lebih Lanjut	Proses lebih lanjut	Usulan dapat diproses lebih lanjut, mohon untuk melengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.	null	1	Kegiatan	100,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
88	952063	25-04-2024	JUNAIDI. MA, S. Sos	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perempuan	Lomba Senam KLPI	Dinas Pemberdayaan Perempuan Kab. Sambas, Kab. Sambas	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Usulan disetujui	Proses Lebih Lanjut	Proses lebih lanjut	Usulan dapat diproses lebih lanjut, mohon untuk melengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.	null	1	Kegiatan	25,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
169	953287	29-04-2024	SURIADI	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perempuan	Bimtek	Dinas Pemberdayaan Perempuan kab. Sambas, Kab. Sambas	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Usulan disetujui	Proses Lebih Lanjut	Proses lebih lanjut	Usulan dapat diproses lebih lanjut, mohon untuk melengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.	null	1	Kegiatan	35,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

225	953631	30-04-2024	SUPNI ALATAS	Bantuan atau dukungan atas partisipasi aktif Lembaga / Organisasi Perempuan	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan	kec. tangaran dan keramat, Kab. Sambas	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Usulan disetujui	Proses Lebih Lanjut	Proses lebih lanjut	Usulan dapat diproses lebih lanjut, mohon untuk melengkapi organisasi/lembaga pemberdayaan perempuan yang dituju dalam bentuk program/kegiatan.	null	1	Kegiatan	125,000,000.00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
815	961195	20-05-2024	YUDHA ALWIN, S. Ked	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perempuan	Pemberdayaan dan Pelatihan Perempuan	Kec. Teluk Keramat dan Kec. Tangaran, Kab. Sambas	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Usulan disetujui	Validasi Sekretariat Dewan	Proses lebih lanjut	Usulan dapat diproses lebih lanjut, mohon untuk melengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.	null	1	Kegiatan	75,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
892	961963	22-05-2024	MUZA HAR	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perempuan	Seminar Perempuan	Kab. Sambas, Kab. Sambas	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Usulan disetujui	Validasi Sekretariat Dewan	Proses lebih lanjut	Usulan dapat diproses lebih lanjut, mohon untuk melengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.	null	1	Kegiatan	50,000,000.00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Sumber: SIPD RI, 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Sambas mengampu bidang ketugasan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Oleh karena itu, program dan kegiatan di OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Sambas harus menyesuaikan program, kegiatan dan kebijakan dari Kementerian tersebut.

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diampu oleh Kementrian PPPA. Tujuan dan sasaran strategis Kemen PPPA tahun 2025-2029 sesuai Visi dan Misi Kemen PPPA dalam penyelenggaraan urusan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan. Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:
 - a) Indeks Pembangunan Gender (IPG);
 - b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 - c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan
 - d) Indeks Pengarus Utamaan Gender (PUG) Nasional.
- 2) Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-2 adalah sebagai berikut:
 - a) Indeks Perlindungan Anak (IPA);
 - b) Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
 - c) Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
 - d) Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.
- 3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-3 adalah sebagai berikut:

- a) Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
 - b) Indeks Kualitas Keluarga.
- 4) Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-4 adalah sebagai berikut:

- a) Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
 - b) Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
 - c) Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).
- 5) Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
- Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-5 adalah sebagai berikut:
- a) Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
 - b) Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
 - c) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
 - d) Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN merumuskan tujuan Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Kemendukbangga/BKKBN memiliki tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang Berkualitas.

Ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan ditetapkan dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2021-2029 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya keberhasilan pembangunan keluarga;

- 2) Menurunnya angka fertilitas pada remaja usia 15-19 tahun;
- 3) Meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan kependudukan dan pengendalian penduduk;
- 4) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat yang merata dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana; dan
- 6) Terwujudnya Kemendukbangga/BKKBN yang kolaboratif, kapabel dan berintegritas untuk melayani masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2026, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas Tahun 2025– 2029.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai pada kurun waktu tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas pada periode 2025-2029 adalah “Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas”, dengan cara Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai, sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam melaksanakan kegiatan. Sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas yaitu: 1)Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan 2)Meningkatnya pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga. Tabel 8 menyajikan tujuan dan sasaran renja 2026.

Tabel 8.
Matrik Tujuan/Sasaran Tahun 2025-2029

No	KODE-INDIKATOR	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS	WALIDATA	TEMATIK/TAGGING	STATUS	TARGET 2026
I	Indikator Kinerja Utama (IKU)						
1	04.03.002-Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}}$	PPPA, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, Sasaran RPJMD	Positif	89,29 angka
2	04.03.001-Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic Menghitung indeks masing – masing dimensi Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik Menghitung Indeks Kesetaraan Gender Menghitung Indeks Ketimpangan Gender	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, Sasaran RPJMD	Positif	0,409 angka

		legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.					
3	04.03.004-Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak yang disusun sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.	Penghitungan IPA dimulai dengan menghitung nilai indeks klaster menggunakan nilai indikator yang sudah dinormalisasi dengan metode nilai maksimal dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung dengan bobot indikator yang sama (equal weight) untuk setiap indikator dalam klaster yang sama. Kemudian, nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster. Penghitungan IPA dimulai dengan menghitung nilai indeks klaster menggunakan nilai indikator yang sudah dinormalisasi dengan metode nilai maksimal dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung dengan bobot indikator yang sama (equal weight) untuk setiap indikator dalam klaster yang sama. Kemudian, nilai IPA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster.	PPPA, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, Sasaran RPJMD, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)	Positif	61,05 angka
4	03.07.010-Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.	IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.	BPS, BKKBN, Kemen-PPPA	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Sasaran RPJMD	Positif	66,11 indeks
5	04.03.014- Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE)	Kesetaraan Gender: Penilaian terhadap kebijakan, program, dan kegiatan yang mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Pemberdayaan Perempuan:	Hasil nilai evaluasi Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	PPPA, DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA,	Positif	350 poin

		Penilaian terhadap inisiatif yang mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan. Perlindungan Anak: Penilaian terhadap kebijakan dan program yang melindungi hak-hak anak dan mendorong kesejahteraan mereka.					
6	04.03.013- Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kabupaten atau kota memenuhi standar dan kriteria sebagai lingkungan yang mendukung hak-hak anak. KLA merupakan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pelayanan yang memadai sesuai dengan hak-haknya.	Hasil nilai evaluasi Kabupaten Layak Anak	PPPA, DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA,	Positif	625 poin
7	03.07.008- Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia. IPBK mencerminkan integrasi isu-isu kependudukan ke dalam lima dimensi utama yang saling terkait, yaitu: Kependudukan, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Pembangunan Keluarga, Pendidikan dan Gender, dan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	$IPBK = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i$ Keterangan: S_i : Skor standar pada dimensi ke-i i (yang telah dinormalisasi dari berbagai indikator), n: Jumlah dimensi (biasanya 5 dimensi). IPBK bernilai antara 0 – 100, dengan interpretasi: ≥ 75 = Sangat Tinggi, 60 – 74,99 = Tinggi, 45 – 59,99 = Sedang, 30 – 44,99 = Rendah, < 30 = Sangat Rendah	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA,	Positif	59,81 indeks
8	03.07.009- Indeks Pembangunan	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi	iBangga dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek,	Positif	62,16 indeks

	Keluarga (iBangga)	ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Di luar definisi di atas dianggap sebagai keluarga khusus. Keluarga khusus, adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, seorang kakek/nenek dan cucunya, atau seorang diri (sebatang kara).	masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Selain itu, terdapat pembobotan pada indikator dalam masing-masing dimensi dengan ketentuan skor capaian indikator nasional tertinggi diberikan bobot terendah. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: dengan : dimensi ke- ; : banyaknya dimensi; dan = 1, 2, 3. D1 : INDEKS KETENTRAMAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan : skor capaian dimensi ke-1 untuk indikator ke-j ; : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi ketentraman; dimana j = 1, 2, ..., 6. D2 : INDEKS KEMANDIRIAN, dengan cara perhitungannya adalah: dengan : skor capaian dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi kemandirian; dimana j= 1, 2, ..., 7. D3 : INDEKS KEBAHAGIAAN, dengan cara perhitungannya adalah: Dengan : skor capaian dimensi ke-3 untuk indikator ke-j ; : bobot dimensi ke-3 untuk indikator ke-j ; dan : banyaknya indikator pada dimensi kebahagiaan; dimana j = 1, 2, ..., 4. iBangga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh (>70), berkembang (40-70) atau rentan (<40).		ASTA CITA, PJPk		
--	---------------------------	---	--	--	------------------------	--	--

II	Indikator Kinerja Kunci (IKK)						
II.A	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	04.03.019- Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Anggaran Responsif Gender merupakan alokasi anggaran yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender.	Jumlah ARG pada belanja operasi APBD dibagi jumlah seluruh belanja langsung APBD dikali 100%.	DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, Inmen 2	Positif	5 %
2	06.02.060- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibagi Jumlah angkatan kerja perempuan dikali 100%	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPk), Inmen 2	Positif	73,28 %
3	04.03.028- Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif atau Persentase Perempuan Korban Kekerasan (termasuk	1. Persentase: Ukuran yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) yang menggambarkan proporsi perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menerima layanan komprehensif dari total perempuan korban kekerasan dan TPPO yang teridentifikasi. 2. Perempuan Korban Kekerasan: Perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi. 3. TPPO (Tindak Pidana	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang diberikan layanan sesuai standar dibagi jumlah jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO dikalikan 100%	DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, Inmen 2	Positif	100 %

	TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Perdagangan Orang): Tindak pidana yang melibatkan rekrutmen, transportasi, penampungan, atau penerimaan orang dengan tujuan eksploitasi melalui ancaman, penggunaan kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. 4. Layanan Komprehensif: Layanan yang mencakup berbagai aspek kebutuhan korban, seperti: Layanan Kesehatan: Penanganan medis, konseling kesehatan mental, rehabilitasi. Layanan Hukum: Bantuan hukum, pendampingan dalam proses hukum. Layanan Sosial: Penyediaan tempat tinggal sementara, pendampingan sosial, bantuan ekonomi. Layanan Psikologis: Konseling psikologis, terapi trauma. 5. Mendapatkan Layanan Komprehensif: Mengacu pada perempuan korban kekerasan dan TPPO yang telah menerima satu atau lebih layanan yang disebutkan di atas sesuai dengan kebutuhannya.					
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Suatu layanan berbasis komunitas yang memberikan edukasi, konseling, dan fasilitasi kepada keluarga (orang tua, anak, wali) dengan memperhatikan kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak anak, dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan ramah anak. Mengacu pada Permen PPPA No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan PUSPAGA.	Formula konseptual: $\text{PUSPAGA Efektif} = (E + K + M + S) \times G \times H$ Keterangan: E = Edukasi keluarga tentang pengasuhan, kesehatan mental, dan komunikasi K = Konseling keluarga (ayah, ibu, anak, pasangan) M = Materi berbasis hak anak dan kesetaraan gender	DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif	10 %

			• S = SDM terlatih (psikolog, konselor, fasilitator keluarga) • G = Perspektif gender → Semua aspek bebas diskriminasi peran gender • H = Perspektif hak anak → Memenuhi prinsip KHA (4 prinsip dasar)				
5	Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan PUSPAGA adalah banyaknya keluarga (minimal satu anggota keluarga) yang telah menerima layanan secara langsung dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam periode tertentu (biasanya per tahun). PUSPAGA merupakan layanan non-klinis yang bertujuan memperkuat ketahanan keluarga melalui edukasi, konseling, dan konsultasi dalam rangka mencegah kekerasan terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Jenis Layanan PUSPAGA yang Diakui: Layanan konsultasi/konseling (tatap muka, daring, telepon), Edukasi pengasuhan (parenting class, seminar, pelatihan), Pendampingan kasus non-klinis (misalnya konflik keluarga, pengasuhan anak, perceraian), Layanan rujukan (ke psikolog, pekerja sosial, layanan perlindungan)	$\sum_{i=1}^n K_i$ Keterangan: Ki: Keluarga ke-i yang menerima layanan PUSPAGA, Data dihimpun dari formulir atau sistem pencatatan layanan PUSPAGA, Satu keluarga dihitung satu kali, meskipun mendapatkan beberapa jenis layanan.	DP3AP2KB	RPJMD, Renstra PD	Positif	110 keluarga
6	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak adalah ukuran sejauh mana data yang terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Jumlah dokumen/kebijakan menggunakan data gender dan anak dibagi jumlah total dokumen/kebijakan yang dianalisis dikali 100%	DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif	55 %

	Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	anak dimanfaatkan secara nyata dalam: Perencanaan program/kegiatan, Evaluasi kebijakan, dan Penyusunan kebijakan dan anggaran. Indikator ini digunakan untuk menilai implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan keberpihakan terhadap isu anak dalam pembangunan. Pemanfaatan yang dimaksud mencakup: Penggunaan data terpilah dalam dokumen perencanaan (Renstra, RKPD, RKA, DPA, dsb), Analisis gender dalam penyusunan kebijakan/program, dan Kebijakan/program yang responsif gender dan ramah anak					
7	04.03.003- Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemenuhan hak anak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.	Penghitungan IPHA dimulai dengan menghitung nilai indeks klaster menggunakan nilai indikator yang sudah dinormalisasi dengan metode nilai maksimal dan minimal. Indeks klaster tersebut dihitung dengan bobot indikator yang sama (equal weight) untuk setiap indikator dalam klaster yang sama. Kemudian, nilai IPHA diperoleh dengan mengalikan bobot klaster dengan indeks klaster. - Nilai indeks klaster IPHA $\text{Indeks } K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n \left[\frac{SX_{ji}}{N_j} \right]}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan: Indeks Kj : nilai indeks klaster ke-j SXji : nilai indikator ke-i pada klaster ke-j yang telah dinormalisasi Nj : banyaknya indikator pada klaster ke-j – Nilai IPHA Indeks= (W1 * Indeks D1) + ... + (Wj * Indeks Dj) Keterangan: W1= nilai bobot klaster ke-1 D1= nilai indeks klaster ke-1 Wj= nilai bobot klaster ke-j Dj= nilai indeks klaster ke-j	PPPA, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif	61,76 indeks

8	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Anak memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Layanan Konprehensif adalah sistem layanan yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan dibagi Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus dikalikan 100%	DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif	100 %
9	04.03.016- Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase anak usia 0-17 tahun korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif adalah perbandingan anak korban kekerasan berdasarkan data layanan SAPA Anak dan SImfoni PPA yang dibandingkan anak usia 0-17 tahun korban kekerasan. Layanan Komprehensif pada layanan SAPA Anak adalah layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan anak secara menyeluruh, berkualitas dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus	Rumus perhitungan: % anak korban yang mendapatkan layanan komprehensif= $a/A \times 100\%$. Keterangan: a = Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif di tahun berjalan berdasarkan data SAPA Anak dan SIMFONI PPA A= Jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani Kementerian PPPA dan lembaga layanan PPA di daerah secara keseluruhan di tahun berjalan, baik yang sudah mendapatkan layanan secara tuntas maupun yang belum tuntas	DP3PA2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA,	Positif	100 %

		secara tepat melalui assesmen oleh tenaga profesional, dimana layanan yang diperoleh lebih dari 2 layanan dan sudah diterminasi di pusat dan korban yang mendapatkan layanan merupakan kewenangan pusat/korban yang ditangani oleh pusat. Sehingga, persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapatkan layanan komprehensif diperoleh dari jumlah korban yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi dengan jumlah korban kewenangan pusat. Sementara, berdasarkan data SIMFONI PPA, korban yang mendapatkan layanan komprehesif adalah korban kekerasan yang mendapatkan layanan ≥ 2 layanan. Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapatkan layanan komprehensif diperoleh dari jumlah korban yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi dengan jumlah korban kekerasan.					
10	04.03.005-Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian perlindungan khusus anak sesuai dengan klaster dalam Konvensi Hak Anak.	Penghitungan IPKA dimulai dengan penentuan bobot indikator. Setiap indikator dapat memiliki bobot yang berbeda. Selanjutnya, dilakukan penghitungan IPKA dengan mengalikan tiap nilai indikator dengan bobot indikatornya. Rumus IPKA: $IPKA = (W1 * Indikator1) + \dots + (Wj * Indikatorj)$ Keterangan: W1= nilai bobot indikator ke-1 Indikator1= nilai indikator ke-1 Wj= nilai bobot indikator ke-j Dj= nilai indikator ke-j	PPPA, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif	68,29 indeks
II.B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							

11	03.07.002- TFR (Angka Kelahiran Total) atau Angka Fertilitas Total/ Total Fertility Rate (TFR)	Angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 tahun).	Metode penghitungan TFR sama dengan metode penghitungan ASFR yaitu menggunakan metode tidak langsung dengan metode anak kandung/own children method (OCM). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan Wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya, dengan formula sebagai berikut: $TFR = \frac{1}{1000} \times \left[5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i \right],$ $ASFR_{it} = \frac{Bi}{Pi} \times 100$ dengan: : jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur ; : jumlah wanita kelompok umur ; dan : kelompok umur terdiri dari 15-19 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, dan 45-49 tahun.	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, PJPk, Inmen 2	Positif	2,33 jiwa
12	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 Wanita pada kelompok umur 15-19 tahun. Kelahiran hidup pada wanita berumur antara 15 sampai dengan 19 tahun Atau	Penghitungan ASFR 15-19 tahun menggunakan metode tidak langsung dengan metode anak kandung/own children method (OCM). Metode anak kandung (own children method/OCM) menggunakan Teknik reverse-survival, yaitu suatu cara mengukur fertilitas beberapa tahun ke belakang sebelum sensus atau survei (dilihat dari asosiasi usia tunggal anak kandung dengan usia tunggal ibu kandungnya). Jumlah kelahiran dan jumlah wanita menurut usia tunggal yang diperoleh dari metode	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, PJPk, Inmen 2	Positif	28,68 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun

			reverse-survival menggunakan tingkat survival rasio dari life table yang level mortalitasnya diperoleh dari pengolahan data Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga. Penghitungan ASFR yang dihasilkan dari metode anak kandung ini dapat juga digunakan untuk melihat pola fertilitas. Hal ini dimungkinkan karena metode ini menghasilkan estimasi fertilitas 15 tahun ke belakang dengan menggunakan data usia tunggal anak 0-14 tahun dan usia ibu 15-65 tahun. Untuk memudahkan dan mengurangi human error, proses penghitungan indikator ini menggunakan mini software FERT yang dikembangkan oleh East-West Population Center. Software ini telah diimplementasikan selama ini oleh BPS dalam penghitungan metode anak kandung. Penghitungan ASFR 15-19 tahun, yaitu membagi jumlah kelahiran kelompok usia 15-19 tahun dengan jumlah wanita pada kelompok usia yang sama dikali 1.000. ASFR 15-19 tahun dinyatakan dalam jumlah kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia 15-19 tahun, dengan formula sebagai berikut: Dengan B15-19 : jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur 15-19 tahun dan P15-19 : jumlah wanita kelompok umur 15-19 tahun.				
13	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi penggunaan	Tahap Pertama: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi, baik metode kontrasepsi modern maupun tradisional (Prevalensi Kontrasepsi atau CPR). Tahap Kedua: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, PJPk, Inmen 2	Positif	85,8 %

	(Demand Satisfied)	kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB). Ukuran untuk melihat seberapa besar dari total pasangan atau perempuan usia subur yang membutuhkan kontrasepsi serta benar-benar menggunakan alat atau metode KB.	(Prevalensi Kontrasepsi Modern atau mCPR). Tahap Ketiga: Menghitung PUS yang kebutuhan ber-KBnya tidak terpenuhi (unmet need KB) Tahap Keempat: Berdasarkan tiga tahap di atas, selanjutnya dapat dihitung proporsi kebutuhan KB menurut metode kontrasepsi modern yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut: Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern adalah proporsi kebutuhan KB PUS yang telah terpenuhi penggunaan alat/obat kontrasepsi Modern meliputi IUD, Implant, MOW, MOP, Pil, Suntik, Kondom dan MAL. Berdasarkan Buku Laporan SDKI Tahun 2017 formulasi untuk menghitung Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern sebagai berikut:				
14	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) adalah proporsi wanita usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase. Ini mengukur prevalensi penggunaan metode kontrasepsi modern dalam suatu populasi, yang mencakup semua metode kontrasepsi yang dianggap modern, seperti pil kontrasepsi, alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), kondom, dan metode lainnya.	Jumlah peserta KB aktif modern dibagi jumlah pasangan usia subur dikalikan 100%	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif	61,9 %
15	03.07.019. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak	Kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need KB) meliputi 1) perempuan yang tidak sedang hamil atau	Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang tidak ingin memiliki anak lagi (limiting) atau ingin menunda anak (spacing) tetapi tidak	BKKBN, BPS, DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD,	Negatif	10 %

	terpenuhi (unmet need)	tidak sedang amenore postpartum, dalam keadaan subur, dan ingin menunda kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak ingin anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB; 2) sedang hamil tetapi kehamilannya tidak tepat waktu atau tidak diinginkan, dan 3) sedang amenore postpartum tetapi kehamilannya yang terjadi dalam 2 tahun terakhir tidak tepat waktu atau tidak diinginkan	menggunakan metode kontrasepsi dibagi jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama dan dinyatakan dalam satuan (%) Unmet Need KBI = $(JPUR_{unmet\ need} / JPUR_i) \times 100\%$ Keterangan : Unmet need KBI : Persentase perempuan usia reproduksi pada kelompok i yang kebutuhan keluarga berencana tidak terpenuhi JPUR _{unmet need} : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi JPUR _i : Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok yang sama		Inmen 2, Stunting		
16	03.07.020- Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Perbandingan jumlah ibu hamil yang tidak ingin anak lagi dan yang ingin hamil nanti terhadap jumlah ibu yang saat ini sedang hamil	Jumlah kehamilan yang tidak direncanakan dibagi jumlah ibu hamil dikali 100%	BKKBN, BPS, DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Rakortek, ASTA CITA, Stunting	Positif	11 %
17	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga adalah ukuran proporsi jumlah keluarga yang secara aktif berpartisipasi dalam kelompok-kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Kelompok kegiatan ketahanan keluarga ini bisa meliputi: Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS), Kelompok Kegiatan Poktan lainnya yang berhubungan dengan program ketahanan keluarga. Kriteria partisipasi aktif dapat mencakup:	Jumlah keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan dibagi jumlah seluruh keluarga yang menjadi sasaran dikali 100%	BKKBN, BPS, DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Inmen 2	Positif	78 %

		Kehadiran rutin dalam pertemuan/aktivitas, Keterlibatan dalam pelatihan atau penyuluhan, dan Kontribusi dalam kegiatan kelompok					
18	03.07.014- Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua/keluarga kepada anaknya/anggota keluarga yang berusia remaja. Pengasuhan keluarga pada remaja, di mana remaja adalah anggota keluarga usia 10 - 24 tahun dan belum menikah.	"Indeks pengasuhan remaja dihitung dengan pendekatan agregat indikator, di mana setiap indikator dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh indikator dan masing-masing indikator memiliki tingkat kepentingan bobot yang sama. Indikator ini dinyatakan dalam indeks, dengan formula sebagai berikut: dengan : indikator ke- ; dan : bobot ke- ; di mana . Adapun bobot untuk masing-masing indikator adalah , dengan = banyaknya indikator. V1 : memiliki legalitas diri, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki akta lahir. V2 : akses terhadap pendidikan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah. V3 : terbebas dari pekerjaan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-14 tahun) tidak/belum bekerja. V4 : memiliki jaminan kesehatan, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap remaja (10-24 tahun) memiliki asuransi kesehatan (pemerintah/swasta). V5: memiliki jaminan masa depan, adalah persentase keluarga punya remaja yang memiliki aset: tabungan (uang kontan/rekening aktif), emas/perhiasan (minimal 10 gram), dan atau hewan ternak yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, PJPk	Positif	83,6 indeks

			memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan. V6 : kecukupan gizi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari. V7 : kondisi sehat, adalah persentase keluarga punya remaja di mana tidak ada anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis dan atau disabilitas. V8 : akses terhadap sumber informasi, adalah persentase keluarga punya remaja di mana terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet)."				
19	Indeks Lansia Berdaya	Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan	"Indeks Lansia Berdaya dihitung berdasarkan 7 Dimensi Lansia Tangguh dengan variabel sebagai berikut. - Dimensi Spiritual: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut; - Dimensi Fisik: Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari; - Dimensi Emosional: a. Tanpa tegur sapa (selama 3 hari berturut-turut); b. Pisah ranjang antara suami dan istri (selama 7 hari berturut-turut); c. Pergi dari rumah/minggat (selama 2 hari berturut-turut); d. Kekerasan dalam rumah tangga - Dimensi Sosial Kemasyarakatan: Keluarga yang memiliki lansia dan atau lansia (umur ≥ 60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL);	BKKBN, BPS	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, PJPk	Positif	58 indeks

			- Dimensi Intelektual: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan pendidikan minimal SLTP; - Dimensi Vokasional: Minimal paling sedikit ada 1 (satu) lansia dengan status pekerjaan adalah bekerja; - Dimensi Lingkungan: Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT. - Rumus : D_i : dimensi ke- i, dan w_i : bobot ke- i; dimana $i = 1, 2, \dots, 7$. Adapun bobot untuk masing-masing dimensi adalah $w_1 = 0,1$; $w_2 = 0,1$; $w_3 = 0,2$; $w_4 = 0,1$; $w_5 = 0,25$; $w_6 = 0,15$; dan $w_7 = 0,1$. D_1 : dimensi spiritual (<i>Sp</i>), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang setiap anggota keluarga usia 10 tahun ke atas menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut. D_2 : dimensi intelektual (<i>In</i>), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia dimana terdapat paling sedikit 1 (satu) lansia yang pendidikan terakhir minimal SLTP. D_3 : dimensi fisik (<i>Fs</i>), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang setiap anggota keluarganya makan "makanan beragam" (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari. D_4 : dimensi emosional (<i>Es</i>), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang tidak terdapat konflik diantara anggota keluarga (tanpa tegur sapa,				
--	--	--	--	--	--	--	--

			pisah ranjang antara suami dan istri, pergi dari rumah/minggat, serta kekerasan dalam rumah tangga). D5 : dimensi sosial kemasyarakatan (SK), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang memiliki lansia dan atau lansia(, adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia yang memiliki lansia dan atau lansia (umur ≥ 60 tahun) ikut kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) D6 : dimensi vokasional (PV), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia dimana terdapat paling sedikit 1 (satu) lansia yang bekerja. D7 : dimensi lingkungan (Lk), adalah persentase keluarga punya lansia atau keluarga lansia ikut serta dalam kegiatan sosial/gotong royong di lingkungan RT. Indeks Lansia Tangguh dihitung dengan pendekatan agregat dimensi, dimana setiap dimensi dihitung tingkat pencapaiannya kemudian dilakukan agregat pada seluruh dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tingkat kepentingan bobot yang berbeda. Indeks Lansia Tangguh bernilai 0-100, dengan arti semakin tinggi nilainya berarti semakin baik/tangguh lansianya."				
20	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat	Perhitungan persentase Kampung Keluarga Mandiri, yaitu jumlah desa/kelurahan yang memiliki Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri dibagi dengan jumlah desa/kelurahan. Indikator ini dinyatakan dalam satuan persen (%).	BKKBN, BPS, DP3AP2KB	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, PJPk		22,6 %
21	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan	Pasangan Calon Pengantin (Catin) yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting adalah		DP3AP2KB, BKKBN, Kemenag	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Stunting		90 %

	perkawinan dengan materi pencegahan stunting atau 03.07.017- Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan	pasangan pria dan wanita yang telah mendaftarkan pernikahannya dan mengikuti sesi bimbingan yang diselenggarakan oleh lembaga terkait (seperti KUA, Puskesmas, Dinas P3A, atau BKKBN), dengan materi yang mencakup: Kesehatan reproduksi, Perencanaan keluarga dan jarak kehamilan, Gizi calon ibu & ayah, Pencegahan anemia, Pentingnya pemeriksaan kesehatan pra-nikah, Peran keluarga dalam pencegahan stunting. Bimbingan ini umumnya diberikan melalui program seperti Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dari BKKBN atau Bimbingan Perkawinan bagi Catin dari Kemenag..	$\sum_{i=1}^n P_i$ Keterangan: P_i : Pasangan calon pengantin ke-i yang telah mengikuti bimbingan yang memuat materi pencegahan stunting. Catin hanya dihitung satu kali.				
22	03.07.018- Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK mencakup (Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah dan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Konsep: Calon pengantin mendapatkan pendampingan oleh TPK. Definisi: Calon pengantin yang teregister di Aplikasi Elsimil yang mendapatkan pendampingan edukasi, baik yang dilakukan secara perorangan dan kelompok oleh tim pendamping keluarga dibandingkan dengan calon pengantin yang teregister di SIMKAH.	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan pendampingan edukasi pra nikah, baik perorangan maupun kelompok dibagi calon pengantin dikali 100%.	DP3AP2KB, BKKBN, Kemenag	RPJMN, RPJMD, Renstra PD, Stunting		90 keluarga

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas tahun 2026 tersebar dalam 10 Program, 28 kegiatan, 192 sub kegiatan. Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan prioritas dalam upaya mencapai tujuan dilengkapi dengan indikator masing-masing sesuai dengan PAGU Platfond anggaran sementara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sesuai Pagu Platfond Sementara (DAU & DAK) Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			19.830.113.830
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN			19.830.113.830
	Tujuan	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 3. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 4. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	89,29 0,409 61,05 66,11	19.830.113.830
1,	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas	100%	5.323.495.821
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100%	22.501.707
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.023.485
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.197.917
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	3.197.917

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
	2.08.01.2.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.197.917
	2.08.01.2.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.197.917
	2.08.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.488.637
	2.08.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.197.917
	2.08.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.636.153.993
	2.08.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.521.610.393
	2.08.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	34.886.391
	2.08.01.2.0 2.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	1 Dokumen	65.121.224
	2.08.01.2.0 2.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.907.197
	2.08.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.907.197
	2.08.01.2.0 2.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.907.197
	2.08.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.907.197
	2.08.01.2.0 2.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.907.197
	2.08.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	34.304.928

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.08.01.2.0 3.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.907.197
	2.08.01.2.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.814.395
	2.08.01.2.0 3.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	3.197.917
	2.08.01.2.0 3.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik	1 Laporan	3.779.356
	2.08.01.2.0 3.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.907.197
	2.08.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.977.274
	2.08.01.2.0 3.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	8.721.592
	2.08.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	149.422.357
	2.08.01.2.0 5.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	11.628.790
	2.08.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000
	2.08.01.2.0 5.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.814.395
	2.08.01.2.0 5.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	8.721.592
	2.08.01.2.0 5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	11.628.790
	2.08.01.2.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	11.628.790
	2.08.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	267.927.320
	2.08.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	40.700.765
	2.08.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	29.071.975
	2.08.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	27 Paket	31.979.172
	2.08.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket	46.515.160

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.08.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	32 Paket	52.329.555
	2.08.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.279.546
	2.08.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2.907.197
	2.08.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Laporan	58.143.950
	2.08.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	570.615.613
	2.08.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1 Unit	116.287.900
	2.08.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	14.535.987
	2.08.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	11.628.790
	2.08.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	120.000.000
	2.08.01.2.0 7.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	116.287.900
	2.08.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	145.359.876
	2.08.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	12 Unit	29.071.975
	2.08.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	17.443.185
	2.08.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	397.413.899
	2.08.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.197.917
	2.08.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	43.607.962
	2.08.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Laporan	25.001.898
	2.08.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	325.606.122
	2.08.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	209.339.711

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.08.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.907.197
	2.08.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	40.722.257
	2.08.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	5.814.395
	2.08.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	17.443.185
	2.08.01.2.0 9.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	8.721.592
	2.08.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	87.215.925
	2.08.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	29.071.975
	2.08.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	17.443.185
	2.08.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	100%	35.816.293
	2.08.01.2.1 3.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	30.816.293
	2.08.01.2.1 3.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	5.000.000
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4.540.196.597
	Sasaran	S.1. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (APE) 2. Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	350 poin 625 poin	4.540.196.597
2,	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	5% 73,28%	1.889.129.200

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.08.02.2.0 1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki focal point atau tim PUG aktif	3 Perangka t Daerah	545.500.195
	2.08.02.2.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	82.431.229
	2.08.02.2.0 1.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG</i>	3 Laporan	164.862.454
	2.08.02.2.0 1.0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi</i>	1 Kebijakan	82.431.227
	2.08.02.2.0 1.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG	<i>jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan</i>	10 Lembaga	50.912.831
	2.08.02.2.0 1.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>	3 Lembaga	164.862.454
	2.08.02.2.0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan perempuan yang menerima program penguatan kapasitas di bidang politik, hukum, sosial, dan	1 Organisa si	247.293.681
	2.08.02.2.0 2.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	<i>Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</i>	5 Lembaga	164.862.454
	2.08.02.2.0 2.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial,</i>	30 orang	82.431.227
	2.08.02.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang memperoleh penguatan kapasitas	4 Lembaga	1.096.335.324
	2.08.02.2.0 3.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	<i>jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan</i>	2 Lembaga	164.862.459
	2.08.02.2.0 3.0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan</i>	19 dokumen	931.472.865

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
3,	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85%	1.341.840.114
	2.08.03.2.0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kader, fasilitator, atau relawan masyarakat yang diedukasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap	400 Orang	270.234.161
	2.08.03.2.0 1.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	40 orang	120.234.161
	2.08.03.2.0 1.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	8 Lembaga	150.000.000
	2.08.03.2.0 2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan yang diberikan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kabupaten/Kota	1 Orang	412.156.135
	2.08.03.2.0 2.0006	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	7 Orang	82.431.227
	2.08.03.2.0 2.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	3	164.862.454
	2.08.03.2.0 2.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	7 orang	164.862.454
	2.08.03.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memperoleh penguatan kapasitas	1 Orang	659.449.818
	2.08.03.2.0 3.0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah	4 Lembaga	247.293.683
	2.08.03.2.0 3.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	7 orang	247.293.681

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.08.03.2.0 3.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	3 Dokumen	164.862.454
4,	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1. Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar 2. Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga	10% 110	695.862.923
	2.08.04.2.0 1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan edukasi tentang kesetaraan gender dan hak anak	5 keluarga	209.329.490
	2.08.04.2.0 1.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kebijakan	209.329.490
	2.08.04.2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga dan anak yang memperoleh peningkatan kapasitas	1 Lembaga	258.107.915
	2.08.04.2.0 2.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga	120.000.000
	2.08.04.2.0 2.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	3 Lembaga	138.107.915
	2.08.04.2.0 3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	3 Layanan	228.425.518
	2.08.04.2.0 3.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	5 Orang	41.215.614
	2.08.04.2.0 3.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	20 Orang	41.215.613
	2.08.04.2.0 3.0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	40 Orang	95.994.291

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.08.04.2.0 3.0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	15 Orang	50.000.000
5,	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	55%	71.840.892
	2.08.05.2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Jumlah data pendukung terkait profil gender dan anak	1 Data	71.840.892
	2.08.05.2.0 1.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	35.920.444
	2.08.05.2.0 1.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	5 Lembaga	35.920.448
6,	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,76	262.900.493
	2.08.06.2.0 1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	Jumlah Lembaga PHA yang terbentuk	35 Unit	45.519.873
	2.08.06.2.0 1.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Lembaga	21.676.130
	2.08.06.2.0 1.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	5 Orang	23.843.743
	2.08.06.2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	2 kegiatan	217.380.620
	2.08.06.2.0 2.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	6 Orang	136.249.962

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.08.06.2.0 2.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah	1 Lembaga	23.534.084
	2.08.06.2.0 2.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	1 Lembaga	57.596.574
7,	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif 3. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	100% 100% 68,29	278.622.975
	2.08.07.2.0 1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah	Jumlah Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	1 dokumen	139.713.919
	2.08.07.2.0 1.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	5.000.000
	2.08.07.2.0 1.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	16 Dokumen	17.340.904
	2.08.07.2.0 1.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	40 Orang	100.032.111
	2.08.07.2.0 1.0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	1 Kebijakan	17.340.904
	2.08.07.2.0 2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan yang diberikan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45 orang	60.000.000
	2.08.07.2.0 2.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	4 Orang	5.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.08.07.2.0 2.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	50.000.000
	2.08.07.2.0 2.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat	4 Orang	5.000.000
	2.08.07.2.0 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	17 lembaga	78.909.056
	2.08.07.2.0 3.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	10 Dokumen	5.000.000
	2.08.07.2.0 3.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	5 Dokumen	17.687.486
	2.08.07.2.0 3.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	6 Orang	5.000.000
	2.08.07.2.0 3.0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang	1 Lembaga	51.221.570
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			15.289.917.233
	Sasaran	S.2. Meningkatnya pembangunan berwawasan kependudukan dan keluarga	1. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 2. Indeks Pembangunan	59,81 62,16	15.289.917.233

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
8,	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka Kelahiran Total Total Fertility finte/ TFR) 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific NertiliJ State/ASFR 15-19 3. Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (<i>Demand Satisfied</i>)	2,33 jiwa 28,68 per 1000 wus 15-19 tahun 85,8%	2.666.458.964
	2.08.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan penyelenggaraan kerja sama pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal	9 dokume	206.022.686
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	<i>Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan</i>	3 Kegiatan	18.579.540
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	<i>Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data</i>	1 Kegiatan	5.000.000
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	<i>Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>	19 Kegiatan	35.610.785
	2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	10.000.000
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	<i>Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal</i>	4 Satuan Pendidikan	35.610.791
	2.14.02.2.01.0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal	<i>Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	30.610.785
	2.14.02.2.01.0032	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	<i>Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan</i>	19 Dokumen	10.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.14.02.2.0 1.0033	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000
	2.14.02.2.0 1.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan	44 Perangkat Daerah	50.610.785
	2.08.02.2.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Data Kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengelolaan pembangunan	6 unit	2.460.436.278
	2.14.02.2.0 2.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	19 Laporan	35.610.785
	2.14.02.2.0 2.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang	1 Dokumen	35.610.792
	2.14.02.2.0 2.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	35.610.785
	2.14.02.2.0 2.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	19 Laporan	133.944.860
	2.14.02.2.0 2.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan	1 Dokumen	271.215.702
	2.14.02.2.0 2.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 Laporan	35.610.792
	2.14.02.2.0 2.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga	19 Laporan	35.610.785
	2.14.02.2.0 2.0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	14.244.314
	2.14.02.2.0 2.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi	19 Dokumen	105.767.012
	2.14.02.2.0 2.0024	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	14.244.314
	2.14.02.2.0 2.0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	848.889.169

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.14.02.2.0 2.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	19 Unit	164.114.393
	2.14.02.2.0 2.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	123.863.602
	2.14.02.2.0 2.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	606.098.973
9,	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) 2. Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) 3. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	61,9% 10% 11%	5.710.503.416
	2.08.03.2.0 1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai	Jumlah Kecamatan yang mendukung program Bangga Kencana	9 Kecamatan	1.694.971.658
	2.14.03.2.0 1.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	19 Laporan	35.610.785
	2.14.03.2.0 1.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Unit	573.736.120
	2.14.03.2.0 1.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	19 Laporan	836.079.313

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.14.03.2.0 1.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	19 Laporan	18.579.540
	2.14.03.2.0 1.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	24.772.720
	2.14.03.2.0 1.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang	2 Dokumen	6.193.180
	2.14.03.2.0 1.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi	200.000.000
	2.08.03.2.0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang berkinerja baik	27 orang	557.386.208
	2.14.03.2.0 2.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	20 Unit	371.590.806
	2.14.03.2.0 2.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	120 Orang	30.965.900
	2.14.03.2.0 2.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan	19 Organisasi	61.931.801

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.14.03.2.0 2.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	19 Laporan	92.897.701
	2.08.03.2.0 3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	100%	2.786.554.746
	2.14.03.2.0 3.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19 Laporan	32.204.536
	2.14.03.2.0 3.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	150 Orang	58.835.210
	2.14.03.2.0 3.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	-	-	18.579.540
	2.14.03.2.0 3.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	20 Orang	117.670.421
	2.14.03.2.0 3.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	19 Laporan	842.272.494
	2.14.03.2.0 3.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	20 Orang	1.505.681.235
	2.14.03.2.0 3.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	2 Laporan	23.534.087
	2.14.03.2.0 3.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	5 Orang	30.965.900
	2.14.03.2.0 3.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Orang	23.534.084

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.14.03.2.0 3.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	<i>Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan</i>	40 Orang	9.413.633
	2.14.03.2.0 3.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	<i>Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan</i>	2 Kegiatan	12.386.365
	2.08.03.2.0 4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase peserta KB baru	21,77%	671.590.804
	2.14.03.2.0 4.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga	<i>Jumlah DASHAT di Kampung KB</i>	19 Unit	117.670.421
	2.14.03.2.0 4.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>	34 Kampung	330.965.900
	2.14.03.2.0 4.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	<i>Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	1 Dokumen	222.954.483
10,	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1. Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga 2. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja 3. Indeks Lansia Berdaya 4. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri 5. Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting 6. Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh TPK	78% 83,6 58,0 22,6% 90% 90%	1.589.459.032
	2.14.04.2.0 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL. UPPKS, PIK R) yang di bina	57,6%	1.186.902.326

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.14.04.2.0 1.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>	20 Keluarga	115.000.000
	2.14.04.2.0 1.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	<i>Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia</i>	1 Kegiatan	3.096.590
	2.14.04.2.0 1.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	<i>Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</i>	1 Laporan / Dokumen	20.340.843
	2.14.04.2.0 1.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	1 Laporan	114.271.523
	2.14.04.2.0 1.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia</i>	5 Unit	130.869.656
	2.14.04.2.0 1.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	<i>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))</i>	10 Orang	6.193.180
	2.14.04.2.0 1.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks</i>	100 Orang	23.534.084
	2.14.04.2.0 1.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	<i>Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan</i>	2 Laporan	80.511.341
	2.14.04.2.0 1.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan</i>	2 Dokumen	32.204.536

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA	
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.14.04.2.0 1.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	120 Orang	58.835.210
	2.14.04.2.0 1.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2 Laporan	90.000.000
	2.14.04.2.0 1.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya	92 Kelompok	18.579.540
	2.14.04.2.0 1.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	92.897.701
	2.14.04.2.0 1.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang	30 Kelompok	307.670.421
	2.14.04.2.0 1.0029	Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	19 Laporan	92.897.701
	2.14.04.2.0 2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan PUS peserta KB Kelompok Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R)	88,53%	402.556.706
	2.14.04.2.0 2.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	50 laporan	402.556.706
	J U M L A				19.830.113.830

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 berdasarkan hasil input Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) RI, adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Skpd)
(DAU & DAK) Tahun 2026

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD	
Pemerintahan Kab. Sambas Tahun Anggaran 2026							
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMBAS							
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan							
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SAMBAS							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			Rp. 172.053.115,00	Rp. 0,00	Rp. 172.053.115,00	Rp. 92.056.547,00

2.08.02..2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			Rp. 147.053.032,00	Rp. 0,00	Rp. 147.053.032,00	Rp. 32.490.546,00
2.08.02..2.01.13	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 147.053.032,00	Rp. 0	Rp. 147.053.032,00	Rp. 32.490.546,00
2.08.02..2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Rp. 25.000.083,00	Rp. 0,00	Rp. 25.000.083,00	Rp. 59.566.001,00
2.08.02..2.03.0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.083,00	Rp. 0	Rp. 25.000.083,00	Rp. 59.566.001,00
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Rp. 452.533.340,00	Rp. 0,00	Rp. 452.533.340,00	Rp. 162.693.401,00
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 378.544.881,00	Rp. 0,00	Rp. 378.544.881,00	Rp. 113.596.576,00
2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 189.999.822,00	Rp. 0	Rp. 189.999.822,00	Rp. 26.955.120,00
2.08.03.2.01.0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 102.947.429,00	Rp. 0	Rp. 102.947.429,00	Rp. 44.283.411,00
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 85.597.630,00	Rp. 0	Rp. 85.597.630,00	Rp. 42.358.045,00

2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Rp. 73.988.459,00	Rp. 0,00	Rp. 73.988.459,00	Rp. 49.096.825,00
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 73.988.459,00	Rp. 0	Rp. 73.988.459,00	Rp. 49.096.825,00
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			Rp. 824.999.458,00	Rp. 0,00	Rp. 824.999.458,00	Rp. 201.321.049,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 299.999.458,00	Rp. 0,00	Rp. 299.999.458,00	Rp. 146.484.228,00
2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 99.999.978,00	Rp. 0	Rp. 99.999.978,00	Rp. 63.344.531,00
2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 199.999.480,00	Rp. 0	Rp. 199.999.480,00	Rp. 83.139.697,00
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 525.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 525.000.000,00	Rp. 54.836.821,00

2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 525.000.000,00	Rp. 0	Rp. 525.000.000,00	Rp. 54.836.821,00
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			Rp. 494.350.582,00	Rp. 0,00	Rp. 494.350.582,00	Rp. 496.383.339,00
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Rp. 173.018.977,00	Rp. 0,00	Rp. 173.018.977,00	Rp. 144.402.426,00
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 37.905.637,00
2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 76.658.136,00	Rp. 0	Rp. 76.658.136,00	Rp. 63.176.061,00
2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pajak Daerah	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 96.360.841,00	Rp. 0	Rp. 96.360.841,00	Rp. 43.320.728,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Rp. 321.331.605,00	Rp. 0,00	Rp. 321.331.605,00	Rp. 351.980.913,00

2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 20.439.302,00	Rp. 0	Rp. 20.439.302,00	Rp. 162.452.728,00
2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 100.000.082,00	Rp. 0	Rp. 100.000.082,00	Rp. 81.226.365,00
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 200.892.221,00	Rp. 0	Rp. 200.892.221,00	Rp. 108.301.820,00
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			Rp. 638.094.422,00	Rp. 9.778.400,00	Rp. 647.872.822,00	Rp. 375.747.147,00
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 157.542.316,00	Rp. 0,00	Rp. 157.542.316,00	Rp. 144.402.426,00
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 36.100.607,00
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.149,00	Rp. 0	Rp. 50.000.149,00	Rp. 31.287.192,00
2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 51.000.030,00	Rp. 0	Rp. 51.000.030,00	Rp. 28.880.485,00

2.08.07.2.01.0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 56.542.137,00	Rp. 0	Rp. 56.542.137,00	Rp. 48.134.142,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 370.872.327,00	Rp. 9.778.400,00	Rp. 380.650.727,00	Rp. 162.151.891,00
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 119.400.000,00	Rp. 0	Rp. 119.400.000,00	Rp. 27.376.294,00
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 78.000.000,00	Rp. 0	Rp. 78.000.000,00	Rp. 27.376.293,00
2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 7.200.000,00	Rp. 0	Rp. 7.200.000,00	Rp. 27.376.293,00
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 20.775.000,00	Rp. 0	Rp. 20.775.000,00	Rp. 27.376.293,00
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 144.011.514,00	Rp. 0	Rp. 144.011.514,00	Rp. 27.376.293,00

2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.485.813,00	Rp. 9.778.400,00	Rp. 11.264.213,00	Rp. 25.270.425,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 109.679.779,00	Rp. 0,00	Rp. 109.679.779,00	Rp. 69.192.830,00
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 74.999.123,00	Rp. 0	Rp. 74.999.123,00	Rp. 24.067.072,00
2.08.07.2.03.0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 19.554.495,00
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 34.680.656,00	Rp. 0	Rp. 34.680.656,00	Rp. 25.571.263,00
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp. 4.091.575.214,00	Rp. 113.500.000,00	Rp. 4.205.075.214,00	Rp. 4.283.180.102,80
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 41.485.302,00	Rp. 0,00	Rp. 41.485.302,00	Rp. 17.724.598,00

2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 6.075.914,00	Rp. 0	Rp. 6.075.914,00	Rp. 2.381.596,00
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.864.539,00	Rp. 0	Rp. 5.864.539,00	Rp. 2.519.022,00
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 6.255.874,00	Rp. 0	Rp. 6.255.874,00	Rp. 2.518.996,00
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 6.125.206,00	Rp. 0	Rp. 6.125.206,00	Rp. 2.518.996,00
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 7.518.422,00	Rp. 0	Rp. 7.518.422,00	Rp. 2.518.996,00
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.398.674,00	Rp. 0	Rp. 5.398.674,00	Rp. 2.747.996,00
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 4.246.673,00	Rp. 0	Rp. 4.246.673,00	Rp. 2.518.996,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 2.463.046.224,00	Rp. 0,00	Rp. 2.463.046.224,00	Rp. 3.649.446.167,80
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.323.289.691,00	Rp. 0	Rp. 2.323.289.691,00	Rp. 3.588.990.236,80

2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 99.240.000,00	Rp. 0	Rp. 99.240.000,00	Rp. 51.295.943,00
2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 23.630.436,00	Rp. 0	Rp. 23.630.436,00	Rp. 2.289.997,00
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.391.861,00	Rp. 0	Rp. 1.391.861,00	Rp. 2.289.997,00
2.08.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 13.963.534,00	Rp. 0	Rp. 13.963.534,00	Rp. 2.289.997,00
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.530.702,00	Rp. 0	Rp. 1.530.702,00	Rp. 2.289.997,00
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp. 79.132.902,00	Rp. 0,00	Rp. 79.132.902,00	Rp. 13.052.983,00
2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.058.138,00	Rp. 0	Rp. 2.058.138,00	Rp. 2.289.997,00
2.08.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 35.429.597,00	Rp. 0	Rp. 35.429.597,00	Rp. 2.976.996,00
2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.001.184,00	Rp. 0	Rp. 2.001.184,00	Rp. 2.289.997,00

2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 39.643.983,00	Rp. 0	Rp. 39.643.983,00	Rp. 5.495.993,00
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 11.932.000,00	Rp. 0,00	Rp. 11.932.000,00	Rp. 9.159.989,00
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 11.932.000,00	Rp. 0	Rp. 11.932.000,00	Rp. 9.159.989,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 328.831.288,00	Rp. 0,00	Rp. 328.831.288,00	Rp. 180.909.798,00
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 53.264.171,00	Rp. 0	Rp. 53.264.171,00	Rp. 32.059.964,00
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.009.993,00	Rp. 0	Rp. 50.009.993,00	Rp. 25.189.971,00
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 59.516.802,00	Rp. 0	Rp. 59.516.802,00	Rp. 36.639.960,00
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 39.679.322,00	Rp. 0	Rp. 39.679.322,00	Rp. 41.219.954,00
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 126.361.000,00	Rp. 0	Rp. 126.361.000,00	Rp. 45.799.949,00
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp. 0,00	Rp. 13.500.000,00	Rp. 13.500.000,00	Rp. 9.159.989,00

2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0	Rp. 13.500.000,00	Rp. 13.500.000,00	Rp. 9.159.989,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 568.445.736,00	Rp. 0,00	Rp. 568.445.736,00	Rp. 293.348.678,00
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.988.762,00	Rp. 0	Rp. 5.988.762,00	Rp. 2.518.996,00
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 99.398.102,00	Rp. 0	Rp. 99.398.102,00	Rp. 34.349.962,00
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 463.058.872,00	Rp. 0	Rp. 463.058.872,00	Rp. 256.479.720,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 433.076.296,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 533.076.296,00	Rp. 86.103.903,00
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 307.794.296,00	Rp. 0	Rp. 307.794.296,00	Rp. 3.663.995,00
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 5.280.000,00	Rp. 0	Rp. 5.280.000,00	Rp. 13.739.984,00
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 120.002.000,00	Rp. 100.000.000,00	Rp. 220.002.000,00	Rp. 68.699.924,00
2.08.01.2.13	Penataan Organisasi			Rp. 165.625.466,00	Rp. 0,00	Rp. 165.625.466,00	Rp. 24.273.997,00

2.08.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 165.625.466,00	Rp. 0	Rp. 165.625.466,00	Rp. 24.273.997,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			Rp. 437.199.979,00	Rp. 0,00	Rp. 437.199.979,00	Rp. 314.616.785,00
2.14.02.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			Rp. 99.999.979,00	Rp. 0,00	Rp. 99.999.979,00	Rp. 95.305.601,00
2.14.02.01.0033	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 99.999.979,00	Rp. 0	Rp. 99.999.979,00	Rp. 95.305.601,00
2.14.02.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 337.200.000,00	Rp. 0,00	Rp. 337.200.000,00	Rp. 219.311.184,00
2.14.02.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 171.000.000,00	Rp. 0	Rp. 171.000.000,00	Rp. 77.977.309,00
2.14.02.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 117.000.000,00	Rp. 0	Rp. 117.000.000,00	Rp. 82.850.892,00
2.14.02.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 49.200.000,00	Rp. 0	Rp. 49.200.000,00	Rp. 58.482.983,00

2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Rp. 3.102.456.834,00	Rp. 0,00	Rp. 3.102.456.834,00	Rp. 656.086.403,00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			Rp. 474.999.834,00	Rp. 0,00	Rp. 474.999.834,00	Rp. 132.236.522,00
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 285.000.000,00	Rp. 0	Rp. 285.000.000,00	Rp. 39.313.560,00
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 149.999.834,00	Rp. 0	Rp. 149.999.834,00	Rp. 46.461.481,00
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 40.000.000,00	Rp. 0	Rp. 40.000.000,00	Rp. 46.461.481,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			Rp. 1.121.250.000,00	Rp. 0,00	Rp. 1.121.250.000,00	Rp. 190.611.202,00
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 146.250.000,00	Rp. 0	Rp. 146.250.000,00	Rp. 99.276.668,00
2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 975.000.000,00	Rp. 0	Rp. 975.000.000,00	Rp. 91.334.534,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan			Rp. 551.207.000,00	Rp. 0,00	Rp. 551.207.000,00	Rp. 68.500.898,00

	Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 36.900.000,00	Rp. 0	Rp. 36.900.000,00	Rp. 22.833.630,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 514.307.000,00	Rp. 0	Rp. 514.307.000,00	Rp. 22.833.634,00
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 22.833.634,00
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Rp. 955.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 955.000.000,00	Rp. 264.737.781,00
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 105.000.000,00	Rp. 0	Rp. 105.000.000,00	Rp. 119.132.002,00
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 800.000.000,00	Rp. 0	Rp. 800.000.000,00	Rp. 79.421.334,00
2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 66.184.445,00

2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Rp. 4.410.594.429,00	Rp. 0,00	Rp. 4.410.594.429,00	Rp. 2.209.266.863,00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Rp. 1.414.999.949,00	Rp. 0,00	Rp. 1.414.999.949,00	Rp. 167.777.567,00
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.707.017,00
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 1.365.000.000,00	Rp. 0	Rp. 1.365.000.000,00	Rp. 42.707.017,00
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 49.999.949,00	Rp. 0	Rp. 49.999.949,00	Rp. 39.656.516,00
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.707.017,00

2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Rp. 2.995.594.480,00	Rp. 0,00	Rp. 2.995.594.480,00	Rp. 2.041.489.296,00
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 2.745.594.431,00	Rp. 0	Rp. 2.745.594.431,00	Rp. 1.838.748.290,00
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 250.000.049,00	Rp. 0	Rp. 250.000.049,00	Rp. 202.741.006,00
Jumlah				Rp. 4.623.857.373,00	Rp. 123.278.400,00	Rp. 14.747.135.773,00	Rp. 8.791.351.636,80

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku- pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Strategi untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program- program dan kegiatan-kegiatan tahun 2026 tersebar dalam 10 program, 29 kegiatan dan 71 subkegiatan termasuk kegiatan rutin. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas melaksanakan kebijakan-kebijakan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan.

